SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Dana Desa, perlu mengatur pedoman pelaksanaan Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dispermades P3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah adalah tim yang dibentuk oleh Camat terdiri dari aparat kecamatan dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan Desa
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
22. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
23. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

24. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
25. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
26. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
28. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
30. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
31. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
32. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
33. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
34. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

35. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
36. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan yang secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
37. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUMDesa Bersama adalah BUM Desa yang didirikan dan dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
38. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
39. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
40. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
41. S*tunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

## BAB II
## SUMBER, BESARAN, PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

### Bagian Kesatu
### Sumber dan Besaran
### Pasal 2

(1) Dana Desa bersumber dari Belanja Pemerintah yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Rincian Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp409.878.212.000,00 (empat ratus sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

(3) Pembagian rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembagian dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa
Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar setiap Desa;
b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 4

Besaran Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 6

(1) Alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
(2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:
    a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
    b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
    c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
    d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.

(3) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 7

(1) Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
    a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
    b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
    c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
    d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10*Z1) + (0,50 *Z2) + (0,15*Z3) + (0,25*Z4)} * (AF Kabupaten)

Keterangan:

| | | |
|---|---|---|
| AF Desa | = | Alokasi Formula setiap Desa. |
| Z1 | = | rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Kabupaten Kebumen. |
| Z2 | = | rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Kabupaten Kebumen. |
| Z3 | = | rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se-Kabupaten Kebumen. |
| Z4 | = | rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa se-Kabupaten Kebumen. |
| AF Kabupaten | = | Alokasi Formula Kabupaten Kebumen. |

BAB III
MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran
Pasal 9

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
(3) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
    a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
    b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 10

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

a. Tahap I berupa:
    1) Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2) Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    3) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
b. Tahap II berupa:
    1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
c. Tahap III berupa:
    1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi

penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 11

(1) Penyaluran Dana Desa ke setiap Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Desa mengajukan permohonan pencairan beserta kelengkapannya kepada Camat;
   b. Tim Fasilitasi Kecamatan memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan pencairan dan apabila telah dinyatakan lengkap akan diterbitkan persetujuan Camat yang berisi tentang Hasil Verifikasi untuk mendapatkan Dana Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
   c. Hasil Verifikasi dari Camat beserta kelengkapannya diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades P3A untuk diverifikasi, dan apabila telah dinyatakan lengkap oleh BPKAD maka dapat dilakukan penyaluran Dana Desa.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
   a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
   b. Tahap II berupa:
      1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
      2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh kegiatan; dan
      3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak tahun anggaran sebelumnya.
   c. Tahap III berupa:
      1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh kegiatan; dan
      2) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran.
(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

Pasal 12

(1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Desa kepada Desa
Pasal 13

(1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh KPPN dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
(2) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB IV
PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Prioritas Penggunaan Dana Desa
Pasal 14

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan kepada :

a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
b. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 15

Prioritas penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

a. kebutuhan prioritas;
b. keadilan;
c. kewenangan Desa;
d. fokus;
e. partisipatif;
f. swakelola; dan
g. berbasis sumber daya Desa.

Pasal 16

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
    a. peningkatan kualitas hidup;
    b. peningkatan kesejahteraan;
    c. penanggulangan kemiskinan; dan
    d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 17

(1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
   a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
   b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
   c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
   d. meningkatkan pendapatan asli Desa.

(3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
   a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
   b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
   c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja yang dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.
   d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan
   e. melakukan pencegahan *stunting*.

(4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 18

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 19

Contoh Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Pasal 20

Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.

Pasal 21

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:
    a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah; dan
    b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang akan dialokasikan ke Desa.

Pasal 22

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Pasal 23

(1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 didasarkan pada data IDM.
(2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 24

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
    b. kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 25

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.
(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 27

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 setelah mendapat persetujuan Bupati.
(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

BAB V
PUBLIKASI
Pasal 28

(1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
(2) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Bangunan fisik yang sedang dilaksanakan diberi papan proyek dan setelah selesai dilaksanakan dibuatkan prasasti.
(2) Papan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak memuat sumber dana, besaran dana, volume dan lokasi, jenis pekerjaan dan pelaksana pekerjaan.
(3) Prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak memuat sumber dana, besaran dana, volume dan tahun pembuatan.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban
Pasal 30

(1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
(2) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
(3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(5) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
(6) Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap “TELAH DIVERIFIKASI” dan menjadi dokumen Desa.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 31

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Dispermades P3A.
(2) Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
    b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.
(4) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya dilampiri Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Dispermades P3A dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Dispermades P3A membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala BPKAD dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Kebumen.
(3) Format Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Format Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
(5) Selain menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan atas kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Dana Desa dengan membuat Laporan Berkala dalam bentuk laporan bulanan, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa setelah dana diterima, yang memuat realisasi penerimaan Dana Desa dan realisasi belanja Dana Desa.
(6) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri Laporan Realisasi APBDesa per sumber dana dari Dana Desa dan fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan Sisa Dana Desa dikoordinir oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
(7) Tim Fasilitasi Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat desa di wilayah dilampiri laporan asli dari tingkat desa disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Dispermades P3A.
(8) Dispermades P3A selaku Perangkat Daerah yang membidangi membuat laporan mengenai pelaksanaan Dana Desa kepada Kepala BPKAD dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Kebumen.
(9) Format Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Format Rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat desa di wilayah sebagaimana dimaksud ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA DESA
Pasal 33

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 34

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:
a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
(2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
(3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
(4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
(5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 36

(1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) setelah menerima:

a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

(2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

## BAB VIII
## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu
### Pembinaan
### Pasal 37

(1) Pembinaan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Dana Desa meliputi:
a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.
d. melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
e. memberikan pendampingan, fasilitasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

(2) Pembinaan Camat dalam pelaksanaan Dana Desa meliputi:
a. melakukan pembinaan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa;
b. melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan permohonan pencairan Dana Desa yang dibuktikan dengan Lembar Verifikasi;
c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 38

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa meliputi:

a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan;
b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi;
c. pengawasan dilakukan oleh Camat dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa; dan
d. pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 39

(1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 41

(1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
(2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI KEBUMEN,
ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar (AD) | Alokasi Afirmasi (AA) | Alokasi Kinerja (AK) | Alokasi Formula (AF) | Jumlah Pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayah | Argopeni | 662.806.000 | - | - | 193.412.000 | 856.218.000 |
| 2 | Ayah | Karangduwur | 662.806.000 | - | - | 180.291.000 | 843.097.000 |
| 3 | Ayah | Srati | 662.806.000 | - | - | 186.578.000 | 849.384.000 |
| 4 | Ayah | Pasir | 662.806.000 | - | - | 160.416.000 | 823.222.000 |
| 5 | Ayah | Jintung | 662.806.000 | - | - | 115.307.000 | 778.113.000 |
| 6 | Ayah | Banjararjo | 662.806.000 | - | - | 209.079.000 | 871.885.000 |
| 7 | Ayah | Argosari | 662.806.000 | - | - | 280.389.000 | 943.195.000 |
| 8 | Ayah | Watukelir | 662.806.000 | - | - | 230.134.000 | 892.940.000 |
| 9 | Ayah | Kalibangkang | 662.806.000 | - | - | 239.998.000 | 902.804.000 |
| 10 | Ayah | Tlogosari | 662.806.000 | - | - | 289.062.000 | 951.868.000 |
| 11 | Ayah | Kalipoh | 662.806.000 | - | - | 219.045.000 | 881.851.000 |
| 12 | Ayah | Ayah | 662.806.000 | - | - | 91.188.000 | 753.994.000 |
| 13 | Ayah | Candirenggo | 662.806.000 | - | - | 208.773.000 | 871.579.000 |
| 14 | Ayah | Mangunweni | 662.806.000 | - | - | 256.276.000 | 919.082.000 |
| 15 | Ayah | Jatijajar | 662.806.000 | - | - | 359.926.000 | 1.022.732.000 |
| 16 | Ayah | Demangsari | 662.806.000 | - | - | 191.419.000 | 854.225.000 |
| 17 | Ayah | Bulurejo | 662.806.000 | - | - | 192.445.000 | 855.251.000 |
| 18 | Ayah | Kedungweru | 662.806.000 | - | - | 132.805.000 | 795.611.000 |
| 19 | Buayan | Karangbolong | 662.806.000 | - | - | 146.324.000 | 809.130.000 |
| 20 | Buayan | Jladri | 662.806.000 | - | - | 252.450.000 | 915.256.000 |
| 21 | Buayan | Adiwarno | 662.806.000 | - | - | 154.333.000 | 817.139.000 |
| 22 | Buayan | Rangkah | 662.806.000 | - | - | 124.562.000 | 787.368.000 |
| 23 | Buayan | Wonodadi | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 207.309.000 | 1.014.211.000 |
| 24 | Buayan | Geblug | 662.806.000 | - | - | 100.936.000 | 763.742.000 |
| 25 | Buayan | Rogodadi | 662.806.000 | - | - | 151.533.000 | 814.339.000 |
| 26 | Buayan | Pakuran | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 318.016.000 | 1.162.456.000 |
| 27 | Buayan | Buayan | 662.806.000 | - | - | 153.870.000 | 816.676.000 |
| 28 | Buayan | Sikayu | 662.806.000 | - | - | 505.889.000 | 1.168.695.000 |
| 29 | Buayan | Karangsari | 662.806.000 | - | - | 151.982.000 | 814.788.000 |
| 30 | Buayan | Rogodono | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 228.543.000 | 1.072.983.000 |
| 31 | Buayan | Banyumudal | 662.806.000 | - | - | 392.028.000 | 1.054.834.000 |
| 32 | Buayan | Tugu | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 479.678.000 | 1.324.118.000 |
| 33 | Buayan | Nogoraji | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 455.771.000 | 1.300.211.000 |
| 34 | Buayan | Mergosono | 662.806.000 | - | - | 211.199.000 | 874.005.000 |
| 35 | Buayan | Semampir | 662.806.000 | - | - | 217.881.000 | 880.687.000 |
| 36 | Buayan | Jogomulyo | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 300.878.000 | 1.145.318.000 |
| 37 | Buayan | Purbowangi | 662.806.000 | - | - | 285.017.000 | 947.823.000 |
| 38 | Buayan | Jatiroto | 662.806.000 | - | - | 287.867.000 | 950.673.000 |
| 39 | Puring | Tambakmulyo | 662.806.000 | - | - | 562.827.000 | 1.225.633.000 |
| 40 | Puring | Surorejan | 662.806.000 | - | - | 359.891.000 | 1.022.697.000 |
| 41 | Puring | Waluyorejo | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 290.931.000 | 1.097.833.000 |
| 42 | Puring | Sidoharjo | 662.806.000 | - | - | 205.670.000 | 868.476.000 |
| 43 | Puring | Puliharjo | 662.806.000 | - | - | 275.618.000 | 938.424.000 |
| 44 | Puring | Purwosari | 662.806.000 | - | - | 210.743.000 | 873.549.000 |
| 45 | Puring | Arjowinangun | 662.806.000 | - | - | 145.924.000 | 808.730.000 |
| 46 | Puring | Krandegan | 662.806.000 | - | - | 340.440.000 | 1.003.246.000 |
| 47 | Puring | Kaleng | 662.806.000 | - | - | 217.712.000 | 880.518.000 |
| 48 | Puring | Tukinggedong | 662.806.000 | - | - | 142.319.000 | 805.125.000 |
| 49 | Puring | Purwoharjo | 662.806.000 | - | - | 109.392.000 | 772.198.000 |
| 50 | Puring | Banjarejo | 662.806.000 | - | - | 368.777.000 | 1.031.583.000 |
| 51 | Puring | Wetonkulon | 662.806.000 | - | - | 144.014.000 | 806.820.000 |
| 52 | Puring | Pesuruhan | 662.806.000 | - | - | 102.187.000 | 764.993.000 |
| 53 | Puring | Wetonwetan | 662.806.000 | - | - | 152.572.000 | 815.378.000 |
| 54 | Puring | Kedalemankulon | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 158.044.000 | 964.946.000 |
| 55 | Puring | Kedalemanwetan | 662.806.000 | - | - | 231.481.000 | 894.287.000 |
| 56 | Puring | Srusuhjurutengah | 662.806.000 | - | - | 173.914.000 | 836.720.000 |
| 57 | Puring | Sitiadi | 662.806.000 | - | - | 182.675.000 | 845.481.000 |
| 58 | Puring | Bumirejo | 662.806.000 | - | - | 213.036.000 | 875.842.000 |
| 59 | Puring | Madurejo | 662.806.000 | - | - | 189.811.000 | 852.617.000 |
| 60 | Puring | Sidobunder | 662.806.000 | - | - | 161.935.000 | 824.741.000 |
| 61 | Puring | Sidodadi | 662.806.000 | - | - | 189.483.000 | 852.289.000 |
| 62 | Petanahan | Karangrejo | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 255.139.000 | 1.062.041.000 |
| 63 | Petanahan | Karanggadung | 662.806.000 | - | - | 187.965.000 | 850.771.000 |
| 64 | Petanahan | Tegalretno | 662.806.000 | - | - | 234.460.000 | 897.266.000 |
| 65 | Petanahan | Ampelsari | 662.806.000 | - | - | 168.063.000 | 830.869.000 |
| 66 | Petanahan | Munggu | 662.806.000 | - | - | 173.449.000 | 836.255.000 |
| 67 | Petanahan | Kewangunan | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 154.209.000 | 961.111.000 |
| 68 | Petanahan | Karangduwur | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 153.560.000 | 960.462.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Petanahan | Petanahan | 662.806.000 | - | - | 129.514.000 | 792.320.000 |
| 70 | Petanahan | Kebonsari | 662.806.000 | - | - | 109.127.000 | 771.933.000 |
| 71 | Petanahan | Grogolpenatus | 662.806.000 | - | - | 217.877.000 | 880.683.000 |
| 72 | Petanahan | Grogolbeningsari | 662.806.000 | - | - | 241.143.000 | 903.949.000 |
| 73 | Petanahan | Jogomertan | 662.806.000 | - | - | 191.622.000 | 854.428.000 |
| 74 | Petanahan | Tanjungsari | 662.806.000 | - | - | 254.881.000 | 917.687.000 |
| 75 | Petanahan | Sidomulyo | 662.806.000 | - | - | 146.303.000 | 809.109.000 |
| 76 | Petanahan | Grujugan | 662.806.000 | - | - | 135.669.000 | 798.475.000 |
| 77 | Petanahan | Kritig | 662.806.000 | - | - | 155.773.000 | 818.579.000 |
| 78 | Petanahan | Nampudadi | 662.806.000 | - | - | 157.642.000 | 820.448.000 |
| 79 | Petanahan | Tresnorejo | 662.806.000 | - | - | 106.161.000 | 768.967.000 |
| 80 | Petanahan | Podourip | 662.806.000 | - | - | 106.442.000 | 769.248.000 |
| 81 | Petanahan | Jatimulyo | 662.806.000 | - | - | 163.859.000 | 826.665.000 |
| 82 | Petanahan | Banjarwinangun | 662.806.000 | - | - | 171.225.000 | 834.031.000 |
| 83 | Klirong | Jogosimo | 662.806.000 | - | - | 272.255.000 | 935.061.000 |
| 84 | Klirong | Tanggulangin | 662.806.000 | - | - | 320.217.000 | 983.023.000 |
| 85 | Klirong | Pandanlor | 662.806.000 | - | - | 161.215.000 | 824.021.000 |
| 86 | Klirong | Tambakprogaten | 662.806.000 | - | - | 233.955.000 | 896.761.000 |
| 87 | Klirong | Gebangsari | 662.806.000 | - | - | 231.629.000 | 894.435.000 |
| 88 | Klirong | Klegenrejo | 662.806.000 | - | - | 235.369.000 | 898.175.000 |
| 89 | Klirong | Bendogarap | 662.806.000 | - | - | 133.810.000 | 796.616.000 |
| 90 | Klirong | Kedungsari | 662.806.000 | - | - | 212.189.000 | 874.995.000 |
| 91 | Klirong | Jerukagung | 662.806.000 | - | - | 170.473.000 | 833.279.000 |
| 92 | Klirong | Klegenwonosari | 662.806.000 | - | - | 138.522.000 | 801.328.000 |
| 93 | Klirong | Klirong | 662.806.000 | - | - | 96.611.000 | 759.417.000 |
| 94 | Klirong | Kaliwungu | 662.806.000 | - | - | 109.833.000 | 772.639.000 |
| 95 | Klirong | Jatimalang | 662.806.000 | - | - | 130.642.000 | 793.448.000 |
| 96 | Klirong | Karangglonggong | 662.806.000 | - | - | 91.324.000 | 754.130.000 |
| 97 | Klirong | Ranterejo | 662.806.000 | - | - | 164.262.000 | 827.068.000 |
| 98 | Klirong | Wotbuwono | 662.806.000 | - | - | 153.447.000 | 816.253.000 |
| 99 | Klirong | Tambakagung | 662.806.000 | - | - | 163.519.000 | 826.325.000 |
| 100 | Klirong | Sitirejo | 662.806.000 | - | - | 110.513.000 | 773.319.000 |
| 101 | Klirong | Gadungrejo | 662.806.000 | - | - | 232.805.000 | 895.611.000 |
| 102 | Klirong | Dorowati | 662.806.000 | - | - | 181.564.000 | 844.370.000 |
| 103 | Klirong | Bumiharjo | 662.806.000 | - | - | 205.381.000 | 868.187.000 |
| 104 | Klirong | Kebadongan | 662.806.000 | - | - | 167.243.000 | 830.049.000 |
| 105 | Klirong | Podoluhur | 662.806.000 | - | - | 204.177.000 | 866.983.000 |
| 106 | Klirong | Kedungwinangun | 662.806.000 | - | - | 267.942.000 | 930.748.000 |
| 107 | Buluspesantren | Ayamputih | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 284.895.000 | 1.091.797.000 |
| 108 | Buluspesantren | Setrojenar | 662.806.000 | - | - | 152.129.000 | 814.935.000 |
| 109 | Buluspesantren | Brecong | 662.806.000 | - | - | 315.423.000 | 978.229.000 |
| 110 | Buluspesantren | Banjurpasar | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 183.467.000 | 990.369.000 |
| 111 | Buluspesantren | Indrosari | 662.806.000 | - | - | 134.794.000 | 797.600.000 |
| 112 | Buluspesantren | Buluspesantren | 662.806.000 | - | - | 150.105.000 | 812.911.000 |
| 113 | Buluspesantren | Banjurmukadan | 662.806.000 | - | - | 99.691.000 | 762.497.000 |
| 114 | Buluspesantren | Waluyo | 662.806.000 | - | - | 239.355.000 | 902.161.000 |
| 115 | Buluspesantren | Bocor | 662.806.000 | - | - | 206.780.000 | 869.586.000 |
| 116 | Buluspesantren | Maduretno | 662.806.000 | - | - | 169.175.000 | 831.981.000 |
| 117 | Buluspesantren | Ambalkumolo | 662.806.000 | - | - | 158.565.000 | 821.371.000 |
| 118 | Buluspesantren | Rantewringin | 662.806.000 | - | - | 202.918.000 | 865.724.000 |
| 119 | Buluspesantren | Tambakrejo | 662.806.000 | - | - | 108.316.000 | 771.122.000 |
| 120 | Buluspesantren | Sangubanyu | 662.806.000 | - | - | 211.795.000 | 874.601.000 |
| 121 | Buluspesantren | Arjowinangun | 662.806.000 | - | - | 124.544.000 | 787.350.000 |
| 122 | Buluspesantren | Ampih | 662.806.000 | - | - | 184.009.000 | 846.815.000 |
| 123 | Buluspesantren | Jogopaten | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 185.546.000 | 992.448.000 |
| 124 | Buluspesantren | Kloposawit | 662.806.000 | - | - | 231.061.000 | 893.867.000 |
| 125 | Buluspesantren | Sidomoro | 662.806.000 | - | - | 307.048.000 | 969.854.000 |
| 126 | Buluspesantren | Tanjungrejo | 662.806.000 | - | - | 146.649.000 | 809.455.000 |
| 127 | Buluspesantren | Tanjungsari | 662.806.000 | - | - | 115.914.000 | 778.720.000 |
| 128 | Ambal | Entak | 662.806.000 | - | - | 214.753.000 | 877.559.000 |
| 129 | Ambal | Plempukan Kembaran | 662.806.000 | - | - | 112.959.000 | 775.765.000 |
| 130 | Ambal | Kenoyojayan | 662.806.000 | - | - | 147.645.000 | 810.451.000 |
| 131 | Ambal | Ambalresmi | 662.806.000 | - | - | 240.228.000 | 903.034.000 |
| 132 | Ambal | Kaibonpetangkuran | 662.806.000 | - | - | 178.185.000 | 840.991.000 |
| 133 | Ambal | Kaibon | 662.806.000 | - | - | 184.693.000 | 847.499.000 |
| 134 | Ambal | Sumberjati | 662.806.000 | - | - | 208.319.000 | 871.125.000 |
| 135 | Ambal | Blengorwetan | 662.806.000 | - | - | 107.834.000 | 770.640.000 |
| 136 | Ambal | Blengorkulon | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 179.388.000 | 986.290.000 |
| 137 | Ambal | Benerwetan | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 158.746.000 | 965.648.000 |
| 138 | Ambal | Benerkulon | 662.806.000 | - | - | 311.525.000 | 974.331.000 |
| 139 | Ambal | Ambalkliwonan | 662.806.000 | - | - | 179.112.000 | 841.918.000 |
| 140 | Ambal | Pasarsenen | 662.806.000 | - | - | 204.786.000 | 867.592.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Ambal | Pucangan | 662.806.000 | - | - | 120.406.000 | 783.212.000 |
| 142 | Ambal | Ambalkebrek | 662.806.000 | - | - | 181.323.000 | 844.129.000 |
| 143 | Ambal | Gondanglegi | 662.806.000 | - | - | 227.402.000 | 890.208.000 |
| 144 | Ambal | Banjarsari | 662.806.000 | - | - | 101.653.000 | 764.459.000 |
| 145 | Ambal | Lajer | 662.806.000 | - | - | 128.979.000 | 791.785.000 |
| 146 | Ambal | Singosari | 662.806.000 | - | - | 151.918.000 | 814.724.000 |
| 147 | Ambal | Sidoluhur | 662.806.000 | - | - | 217.746.000 | 880.552.000 |
| 148 | Ambal | Sinungrejo | 662.806.000 | - | - | 121.051.000 | 783.857.000 |
| 149 | Ambal | Ambarwinangun | 662.806.000 | - | - | 128.070.000 | 790.876.000 |
| 150 | Ambal | Peneket | 662.806.000 | - | - | 125.425.000 | 788.231.000 |
| 151 | Ambal | Sidorejo | 662.806.000 | - | - | 114.812.000 | 777.618.000 |
| 152 | Ambal | Sidomulyo | 662.806.000 | - | - | 135.869.000 | 798.675.000 |
| 153 | Ambal | Sidomukti | 662.806.000 | - | - | 183.416.000 | 846.222.000 |
| 154 | Ambal | Prasutan | 662.806.000 | - | - | 114.542.000 | 777.348.000 |
| 155 | Ambal | Kradenan | 662.806.000 | - | - | 129.962.000 | 792.768.000 |
| 156 | Ambal | Pagedangan | 662.806.000 | - | - | 139.015.000 | 801.821.000 |
| 157 | Ambal | Surobayan | 662.806.000 | - | - | 134.864.000 | 797.670.000 |
| 158 | Ambal | Dukuhrejosari | 662.806.000 | - | - | 144.307.000 | 807.113.000 |
| 159 | Ambal | Kembangsawit | 662.806.000 | - | - | 84.669.000 | 747.475.000 |
| 160 | Mirit | Miritpetikusan | 662.806.000 | - | - | 159.370.000 | 822.176.000 |
| 161 | Mirit | Tlogodepok | 662.806.000 | - | - | 195.301.000 | 858.107.000 |
| 162 | Mirit | Mirit | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 161.245.000 | 968.147.000 |
| 163 | Mirit | Tlogopragoto | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 144.656.000 | 951.558.000 |
| 164 | Mirit | Lembupurwo | 662.806.000 | - | - | 321.974.000 | 984.780.000 |
| 165 | Mirit | Wiromartan | 662.806.000 | - | - | 191.210.000 | 854.016.000 |
| 166 | Mirit | Rowo | 662.806.000 | - | - | 140.850.000 | 803.656.000 |
| 167 | Mirit | Singoyudan | 662.806.000 | - | - | 165.697.000 | 828.503.000 |
| 168 | Mirit | Wergonayan | 662.806.000 | - | - | 160.285.000 | 823.091.000 |
| 169 | Mirit | Selotumpeng | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 224.306.000 | 1.031.208.000 |
| 170 | Mirit | Sitibentar | 662.806.000 | - | - | 204.981.000 | 867.787.000 |
| 171 | Mirit | Karanggede | 662.806.000 | - | - | 132.173.000 | 794.979.000 |
| 172 | Mirit | Kertodeso | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 242.322.000 | 1.049.224.000 |
| 173 | Mirit | Patukrejomulyo | 662.806.000 | - | - | 158.713.000 | 821.519.000 |
| 174 | Mirit | Patukgawemulyo | 662.806.000 | - | - | 169.096.000 | 831.902.000 |
| 175 | Mirit | Mangunranan | 662.806.000 | - | - | 158.233.000 | 821.039.000 |
| 176 | Mirit | Pekutan | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 156.390.000 | 963.292.000 |
| 177 | Mirit | Wirogaten | 662.806.000 | - | - | 262.141.000 | 924.947.000 |
| 178 | Mirit | Winong | 662.806.000 | - | - | 87.719.000 | 750.525.000 |
| 179 | Mirit | Ngabean | 662.806.000 | - | - | 274.241.000 | 937.047.000 |
| 180 | Mirit | Sarwogadung | 662.806.000 | - | - | 203.937.000 | 866.743.000 |
| 181 | Mirit | Krubungan | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 124.700.000 | 931.602.000 |
| 182 | Prembun | Tersobo | 662.806.000 | - | - | 127.237.000 | 790.043.000 |
| 183 | Prembun | Prembun | 662.806.000 | - | - | 124.302.000 | 787.108.000 |
| 184 | Prembun | Kabekelan | 662.806.000 | - | - | 114.893.000 | 777.699.000 |
| 185 | Prembun | Tunggalroso | 662.806.000 | - | - | 146.727.000 | 809.533.000 |
| 186 | Prembun | Kedungwaru | 662.806.000 | - | - | 250.557.000 | 913.363.000 |
| 187 | Prembun | Bagung | 662.806.000 | - | - | 113.534.000 | 776.340.000 |
| 188 | Prembun | Sidogede | 662.806.000 | - | - | 333.829.000 | 996.635.000 |
| 189 | Prembun | Sembirkadipaten | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 141.639.000 | 948.541.000 |
| 190 | Prembun | Kedungbulus | 662.806.000 | - | - | 136.032.000 | 798.838.000 |
| 191 | Prembun | Mulyosri | 662.806.000 | - | - | 158.403.000 | 821.209.000 |
| 192 | Prembun | Pesuningan | 662.806.000 | - | - | 138.615.000 | 801.421.000 |
| 193 | Prembun | Pecarikan | 662.806.000 | - | - | 118.982.000 | 781.788.000 |
| 194 | Prembun | Kabuaran | 662.806.000 | - | - | 196.946.000 | 859.752.000 |
| 195 | Kutowinangun | Pekunden | 662.806.000 | - | - | 149.891.000 | 812.697.000 |
| 196 | Kutowinangun | Tanjungmeru | 662.806.000 | - | - | 134.034.000 | 796.840.000 |
| 197 | Kutowinangun | Kuwarisan | 662.806.000 | - | - | 112.498.000 | 775.304.000 |
| 198 | Kutowinangun | Kutowinangun | 662.806.000 | - | - | 115.304.000 | 778.110.000 |
| 199 | Kutowinangun | Lundong | 662.806.000 | - | - | 174.458.000 | 837.264.000 |
| 200 | Kutowinangun | Mekarsari | 662.806.000 | - | - | 213.833.000 | 876.639.000 |
| 201 | Kutowinangun | Babadsari | 662.806.000 | - | - | 183.501.000 | 846.307.000 |
| 202 | Kutowinangun | Ungaran | 662.806.000 | - | - | 119.210.000 | 782.016.000 |
| 203 | Kutowinangun | Mrinen | 662.806.000 | - | - | 118.833.000 | 781.639.000 |
| 204 | Kutowinangun | Pejagatan | 662.806.000 | - | - | 232.783.000 | 895.589.000 |
| 205 | Kutowinangun | Triwarno | 662.806.000 | - | - | 207.014.000 | 869.820.000 |
| 206 | Kutowinangun | Korowelang | 662.806.000 | - | - | 163.031.000 | 825.837.000 |
| 207 | Kutowinangun | Jlegiwinangun | 662.806.000 | - | - | 238.760.000 | 901.566.000 |
| 208 | Kutowinangun | Lumbu | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 286.227.000 | 1.130.667.000 |
| 209 | Kutowinangun | Tanjungsari | 662.806.000 | - | - | 236.417.000 | 899.223.000 |
| 210 | Kutowinangun | Kaliputih | 662.806.000 | - | - | 140.894.000 | 803.700.000 |
| 211 | Kutowinangun | Tanjungseto | 662.806.000 | - | - | 132.816.000 | 795.622.000 |
| 212 | Kutowinangun | Pesalakan | 662.806.000 | - | - | 139.712.000 | 802.518.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | Kutowinangun | Karangsari | 662.806.000 | - | - | 221.601.000 | 884.407.000 |
| 214 | Alian | Bojongsari | 662.806.000 | - | - | 314.159.000 | 976.965.000 |
| 215 | Alian | Surotrunan | 662.806.000 | - | - | 363.866.000 | 1.026.672.000 |
| 216 | Alian | Kambangsari | 662.806.000 | - | - | 138.436.000 | 801.242.000 |
| 217 | Alian | Jatimulyo | 662.806.000 | - | - | 194.062.000 | 856.868.000 |
| 218 | Alian | Tanuharjo | 662.806.000 | - | - | 190.998.000 | 853.804.000 |
| 219 | Alian | Karangtanjung | 662.806.000 | - | - | 220.042.000 | 882.848.000 |
| 220 | Alian | Kemangguan | 662.806.000 | - | - | 434.329.000 | 1.097.135.000 |
| 221 | Alian | Kalijaya | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 384.049.000 | 1.190.951.000 |
| 222 | Alian | Karangkembang | 662.806.000 | - | - | 237.962.000 | 900.768.000 |
| 223 | Alian | Seliling | 662.806.000 | - | - | 413.978.000 | 1.076.784.000 |
| 224 | Alian | Tlogowulung | 662.806.000 | - | - | 186.435.000 | 849.241.000 |
| 225 | Alian | Kaliputih | 662.806.000 | - | - | 391.740.000 | 1.054.546.000 |
| 226 | Alian | Wonokromo | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 577.577.000 | 1.384.479.000 |
| 227 | Alian | Sawangan | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 263.189.000 | 1.070.091.000 |
| 228 | Alian | Kalirancang | 662.806.000 | - | - | 345.976.000 | 1.008.782.000 |
| 229 | Alian | Krakal | 662.806.000 | - | - | 556.410.000 | 1.219.216.000 |
| 230 | Kebumen | Muktisari | 662.806.000 | - | - | 212.157.000 | 874.963.000 |
| 231 | Kebumen | Murtirejo | 662.806.000 | - | - | 275.830.000 | 938.636.000 |
| 232 | Kebumen | Depokrejo | 662.806.000 | - | - | 236.810.000 | 899.616.000 |
| 233 | Kebumen | Mengkowo | 662.806.000 | - | - | 135.275.000 | 798.081.000 |
| 234 | Kebumen | Gesikan | 662.806.000 | - | - | 175.852.000 | 838.658.000 |
| 235 | Kebumen | Kalibagor | 662.806.000 | - | - | 279.299.000 | 942.105.000 |
| 236 | Kebumen | Argopeni | 662.806.000 | - | - | 209.641.000 | 872.447.000 |
| 237 | Kebumen | Jatisari | 662.806.000 | - | - | 266.824.000 | 929.630.000 |
| 238 | Kebumen | Kalirejo | 662.806.000 | - | - | 206.449.000 | 869.255.000 |
| 239 | Kebumen | Adikarso | 662.806.000 | - | - | 197.687.000 | 860.493.000 |
| 240 | Kebumen | Kembaran | 662.806.000 | - | - | 104.288.000 | 767.094.000 |
| 241 | Kebumen | Sumberadi | 662.806.000 | - | - | 165.647.000 | 828.453.000 |
| 242 | Kebumen | Wonosari | 662.806.000 | - | - | 242.660.000 | 905.466.000 |
| 243 | Kebumen | Roworejo | 662.806.000 | - | - | 223.361.000 | 886.167.000 |
| 244 | Kebumen | Tanahsari | 662.806.000 | - | - | 264.687.000 | 927.493.000 |
| 245 | Kebumen | Bandung | 662.806.000 | - | - | 253.247.000 | 916.053.000 |
| 246 | Kebumen | Candimulyo | 662.806.000 | - | - | 188.603.000 | 851.409.000 |
| 247 | Kebumen | Kalijirek | 662.806.000 | - | - | 200.713.000 | 863.519.000 |
| 248 | Kebumen | Candiwulan | 662.806.000 | - | - | 178.224.000 | 841.030.000 |
| 249 | Kebumen | Kawedusan | 662.806.000 | - | - | 104.334.000 | 767.140.000 |
| 250 | Kebumen | Kutosari | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 136.962.000 | 943.864.000 |
| 251 | Kebumen | Gemeksekti | 662.806.000 | - | - | 299.477.000 | 962.283.000 |
| 252 | Kebumen | Karangsari | 662.806.000 | - | - | 255.975.000 | 918.781.000 |
| 253 | Kebumen | Jemur | 662.806.000 | - | - | 237.453.000 | 900.259.000 |
| 254 | Pejagoan | Logede | 662.806.000 | - | - | 170.617.000 | 833.423.000 |
| 255 | Pejagoan | Kewayuhan | 662.806.000 | - | - | 219.845.000 | 882.651.000 |
| 256 | Pejagoan | Kedawung | 662.806.000 | - | - | 332.726.000 | 995.532.000 |
| 257 | Pejagoan | Pejagoan | 662.806.000 | - | - | 231.041.000 | 893.847.000 |
| 258 | Pejagoan | Kebulusan | 662.806.000 | - | - | 213.413.000 | 876.219.000 |
| 259 | Pejagoan | Aditirto | 662.806.000 | - | - | 202.901.000 | 865.707.000 |
| 260 | Pejagoan | Karangpoh | 662.806.000 | - | - | 253.929.000 | 916.735.000 |
| 261 | Pejagoan | Jemur | 662.806.000 | - | - | 402.129.000 | 1.064.935.000 |
| 262 | Pejagoan | Prigi | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 264.104.000 | 1.071.006.000 |
| 263 | Pejagoan | Kebagoran | 662.806.000 | - | - | 199.320.000 | 862.126.000 |
| 264 | Pejagoan | Pengaringan | 662.806.000 | - | - | 127.625.000 | 790.431.000 |
| 265 | Pejagoan | Peniron | 662.806.000 | - | - | 826.429.000 | 1.489.235.000 |
| 266 | Pejagoan | Watulawang | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 188.739.000 | 995.641.000 |
| 267 | Sruweng | Menganti | 662.806.000 | - | - | 184.374.000 | 847.180.000 |
| 268 | Sruweng | Trikarso | 662.806.000 | - | - | 194.105.000 | 856.911.000 |
| 269 | Sruweng | Sidoarjo | 662.806.000 | - | - | 184.319.000 | 847.125.000 |
| 270 | Sruweng | Giwangretno | 662.806.000 | - | - | 184.126.000 | 846.932.000 |
| 271 | Sruweng | Jabres | 662.806.000 | - | - | 81.828.000 | 744.634.000 |
| 272 | Sruweng | Sruweng | 662.806.000 | - | - | 113.064.000 | 775.870.000 |
| 273 | Sruweng | Karanggedang | 662.806.000 | - | - | 177.262.000 | 840.068.000 |
| 274 | Sruweng | Purwodeso | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 104.939.000 | 911.841.000 |
| 275 | Sruweng | Klepusanggar | 662.806.000 | - | - | 105.955.000 | 768.761.000 |
| 276 | Sruweng | Tanggeran | 662.806.000 | - | - | 225.142.000 | 887.948.000 |
| 277 | Sruweng | Karangsari | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 108.200.000 | 915.102.000 |
| 278 | Sruweng | Karangpule | 662.806.000 | - | - | 208.317.000 | 871.123.000 |
| 279 | Sruweng | Pakuran | 662.806.000 | - | - | 286.953.000 | 949.759.000 |
| 280 | Sruweng | Pengempon | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 562.484.000 | 1.406.924.000 |
| 281 | Sruweng | Kejawang | 662.806.000 | - | - | 162.148.000 | 824.954.000 |
| 282 | Sruweng | Karangjambu | 662.806.000 | - | - | 135.930.000 | 798.736.000 |
| 283 | Sruweng | Sidoagung | 662.806.000 | - | - | 411.508.000 | 1.074.314.000 |
| 284 | Sruweng | Penusupan | 662.806.000 | - | - | 151.312.000 | 814.118.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Sruweng | Donosari | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 226.171.000 | 1.070.611.000 |
| 286 | Sruweng | Pandansari | 662.806.000 | - | - | 710.679.000 | 1.373.485.000 |
| 287 | Sruweng | Condongcampur | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 212.563.000 | 1.057.003.000 |
| 288 | Adimulyo | Sugihwaras | 662.806.000 | - | - | 173.971.000 | 836.777.000 |
| 289 | Adimulyo | Tambaharjo | 662.806.000 | - | - | 170.483.000 | 833.289.000 |
| 290 | Adimulyo | Tepakyang | 662.806.000 | - | - | 152.340.000 | 815.146.000 |
| 291 | Adimulyo | Sidomulyo | 662.806.000 | - | - | 116.799.000 | 779.605.000 |
| 292 | Adimulyo | Wajasari | 662.806.000 | - | - | 94.093.000 | 756.899.000 |
| 293 | Adimulyo | Candiwulan | 662.806.000 | - | - | 113.978.000 | 776.784.000 |
| 294 | Adimulyo | Adikarto | 662.806.000 | - | - | 98.775.000 | 761.581.000 |
| 295 | Adimulyo | Adimulyo | 662.806.000 | - | - | 135.516.000 | 798.322.000 |
| 296 | Adimulyo | Temanggal | 662.806.000 | - | - | 86.746.000 | 749.552.000 |
| 297 | Adimulyo | Joho | 662.806.000 | - | - | 96.732.000 | 759.538.000 |
| 298 | Adimulyo | Adiluhur | 662.806.000 | - | - | 129.795.000 | 792.601.000 |
| 299 | Adimulyo | Tegalsari | 662.806.000 | - | - | 152.526.000 | 815.332.000 |
| 300 | Adimulyo | Sekarteja | 662.806.000 | - | - | 115.298.000 | 778.104.000 |
| 301 | Adimulyo | Kemujan | 662.806.000 | - | - | 111.590.000 | 774.396.000 |
| 302 | Adimulyo | Mangunharjo | 662.806.000 | - | - | 114.098.000 | 776.904.000 |
| 303 | Adimulyo | Banyuroto | 662.806.000 | - | - | 149.043.000 | 811.849.000 |
| 304 | Adimulyo | Meles | 662.806.000 | - | - | 131.905.000 | 794.711.000 |
| 305 | Adimulyo | Caruban | 662.806.000 | - | - | 124.931.000 | 787.737.000 |
| 306 | Adimulyo | Bonjok | 662.806.000 | - | - | 127.476.000 | 790.282.000 |
| 307 | Adimulyo | Arjomulyo | 662.806.000 | - | - | 117.641.000 | 780.447.000 |
| 308 | Adimulyo | Arjosari | 662.806.000 | - | - | 106.054.000 | 768.860.000 |
| 309 | Adimulyo | Pekuwon | 662.806.000 | - | - | 131.516.000 | 794.322.000 |
| 310 | Adimulyo | Sidomukti | 662.806.000 | - | - | 144.888.000 | 807.694.000 |
| 311 | Kuwarasan | Kamulyan | 662.806.000 | - | - | 110.862.000 | 773.668.000 |
| 312 | Kuwarasan | Sidomukti | 662.806.000 | - | - | 189.898.000 | 852.704.000 |
| 313 | Kuwarasan | Tambaksari | 662.806.000 | - | - | 106.552.000 | 769.358.000 |
| 314 | Kuwarasan | Kalipurwo | 662.806.000 | - | - | 163.084.000 | 825.890.000 |
| 315 | Kuwarasan | Purwodadi | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 150.146.000 | 957.048.000 |
| 316 | Kuwarasan | Pondokgebangsari | 662.806.000 | - | - | 114.847.000 | 777.653.000 |
| 317 | Kuwarasan | Kuwarasan | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 147.410.000 | 954.312.000 |
| 318 | Kuwarasan | Harjodowo | 662.806.000 | - | - | 152.362.000 | 815.168.000 |
| 319 | Kuwarasan | Lemahduwur | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 218.140.000 | 1.062.580.000 |
| 320 | Kuwarasan | Madureso | 662.806.000 | - | - | 257.053.000 | 919.859.000 |
| 321 | Kuwarasan | Mangli | 662.806.000 | - | - | 142.198.000 | 805.004.000 |
| 322 | Kuwarasan | Gandusari | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 188.053.000 | 994.955.000 |
| 323 | Kuwarasan | Ori | 662.806.000 | - | - | 140.531.000 | 803.337.000 |
| 324 | Kuwarasan | Serut | 662.806.000 | - | - | 96.680.000 | 759.486.000 |
| 325 | Kuwarasan | Banjarejo | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 150.143.000 | 957.045.000 |
| 326 | Kuwarasan | Gumawang | 662.806.000 | - | - | 167.273.000 | 830.079.000 |
| 327 | Kuwarasan | Wonoyoso | 662.806.000 | - | - | 196.325.000 | 859.131.000 |
| 328 | Kuwarasan | Gunungmujil | 662.806.000 | - | - | 270.839.000 | 933.645.000 |
| 329 | Kuwarasan | Kuwaru | 662.806.000 | - | - | 125.199.000 | 788.005.000 |
| 330 | Kuwarasan | Bendungan | 662.806.000 | - | - | 145.660.000 | 808.466.000 |
| 331 | Kuwarasan | Jatimulyo | 662.806.000 | - | - | 122.355.000 | 785.161.000 |
| 332 | Kuwarasan | Sawangan | 662.806.000 | - | - | 160.298.000 | 823.104.000 |
| 333 | Rowokele | Redisari | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 224.979.000 | 1.031.881.000 |
| 334 | Rowokele | Kalisari | 662.806.000 | - | - | 297.779.000 | 960.585.000 |
| 335 | Rowokele | Pringtutul | 662.806.000 | - | - | 321.570.000 | 984.376.000 |
| 336 | Rowokele | Rowokele | 662.806.000 | - | - | 241.304.000 | 904.110.000 |
| 337 | Rowokele | Bumiagung | 662.806.000 | - | - | 361.870.000 | 1.024.676.000 |
| 338 | Rowokele | Jatiluhur | 662.806.000 | - | - | 211.321.000 | 874.127.000 |
| 339 | Rowokele | Kretek | 662.806.000 | - | - | 323.288.000 | 986.094.000 |
| 340 | Rowokele | Sukomulyo | 662.806.000 | - | - | 459.093.000 | 1.121.899.000 |
| 341 | Rowokele | Giyanti | 662.806.000 | - | - | 606.581.000 | 1.269.387.000 |
| 342 | Rowokele | Wonoharjo | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 790.212.000 | 1.597.114.000 |
| 343 | Rowokele | Wagirpandan | 662.806.000 | - | - | 483.668.000 | 1.146.474.000 |
| 344 | Sempor | Sidoharum | 662.806.000 | - | - | 366.229.000 | 1.029.035.000 |
| 345 | Sempor | Selokerto | 662.806.000 | - | - | 187.348.000 | 850.154.000 |
| 346 | Sempor | Kalibeji | 662.806.000 | - | - | 441.897.000 | 1.104.703.000 |
| 347 | Sempor | Jatinegara | 662.806.000 | - | - | 266.173.000 | 928.979.000 |
| 348 | Sempor | Bejiruyung | 662.806.000 | - | - | 174.420.000 | 837.226.000 |
| 349 | Sempor | Pekuncen | 662.806.000 | - | - | 202.917.000 | 865.723.000 |
| 350 | Sempor | Kedungjati | 662.806.000 | - | - | 247.971.000 | 910.777.000 |
| 351 | Sempor | Semali | 662.806.000 | - | - | 255.481.000 | 918.287.000 |
| 352 | Sempor | Bonosari | 662.806.000 | - | - | 302.790.000 | 965.596.000 |
| 353 | Sempor | Sempor | 662.806.000 | - | - | 435.930.000 | 1.098.736.000 |
| 354 | Sempor | Tunjungseto | 662.806.000 | - | - | 549.272.000 | 1.212.078.000 |
| 355 | Sempor | Sampang | 662.806.000 | - | - | 804.567.000 | 1.467.373.000 |
| 356 | Sempor | Donorejo | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 636.659.000 | 1.481.099.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | Sempor | Kedungwringin | 662.806.000 | - | - | 754.328.000 | 1.417.134.000 |
| 358 | Sempor | Kenteng | 662.806.000 | - | - | 446.733.000 | 1.109.539.000 |
| 359 | Sempor | Somagede | 662.806.000 | - | - | 655.546.000 | 1.318.352.000 |
| 360 | Gombong | Kalitengah | 662.806.000 | - | - | 231.520.000 | 894.326.000 |
| 361 | Gombong | Kemukus | 662.806.000 | - | - | 167.832.000 | 830.638.000 |
| 362 | Gombong | Banjarsari | 662.806.000 | - | - | 128.265.000 | 791.071.000 |
| 363 | Gombong | Panjangsari | 662.806.000 | - | - | 115.366.000 | 778.172.000 |
| 364 | Gombong | Patemon | 662.806.000 | - | - | 151.062.000 | 813.868.000 |
| 365 | Gombong | Kedungpuji | 662.806.000 | - | - | 130.185.000 | 792.991.000 |
| 366 | Gombong | Wero | 662.806.000 | - | - | 96.371.000 | 759.177.000 |
| 367 | Gombong | Semondo | 662.806.000 | - | - | 167.031.000 | 829.837.000 |
| 368 | Gombong | Semanding | 662.806.000 | - | - | 224.354.000 | 887.160.000 |
| 369 | Gombong | Sidayu | 662.806.000 | - | - | 78.767.000 | 741.573.000 |
| 370 | Gombong | Wonosigro | 662.806.000 | - | - | 146.158.000 | 808.964.000 |
| 371 | Gombong | Klopogodo | 662.806.000 | - | - | 244.734.000 | 907.540.000 |
| 372 | Karanganyar | Sidomulyo | 662.806.000 | - | - | 98.859.000 | 761.665.000 |
| 373 | Karanganyar | Candi | 662.806.000 | - | - | 207.327.000 | 870.133.000 |
| 374 | Karanganyar | Giripurno | 662.806.000 | - | - | 288.638.000 | 951.444.000 |
| 375 | Karanganyar | Karangkemiri | 662.806.000 | - | - | 149.077.000 | 811.883.000 |
| 376 | Karanganyar | Wonorejo | 662.806.000 | - | - | 290.357.000 | 953.163.000 |
| 377 | Karanganyar | Grenggeng | 662.806.000 | - | - | 304.149.000 | 966.955.000 |
| 378 | Karanganyar | Pohkumbang | 662.806.000 | - | - | 378.030.000 | 1.040.836.000 |
| 379 | Karanggayam | Karanggayam | 662.806.000 | - | - | 584.748.000 | 1.247.554.000 |
| 380 | Karanggayam | Kajoran | 662.806.000 | - | - | 501.826.000 | 1.164.632.000 |
| 381 | Karanggayam | Karangtengah | 662.806.000 | - | - | 169.204.000 | 832.010.000 |
| 382 | Karanggayam | Karangmojo | 662.806.000 | - | - | 208.448.000 | 871.254.000 |
| 383 | Karanggayam | Penimbun | 662.806.000 | - | - | 351.509.000 | 1.014.315.000 |
| 384 | Karanggayam | Kalirejo | 662.806.000 | - | - | 542.922.000 | 1.205.728.000 |
| 385 | Karanggayam | Pagebangan | 662.806.000 | - | - | 180.764.000 | 843.570.000 |
| 386 | Karanggayam | Clapar | 662.806.000 | - | - | 341.711.000 | 1.004.517.000 |
| 387 | Karanggayam | Logandu | 662.806.000 | - | - | 669.958.000 | 1.332.764.000 |
| 388 | Karanggayam | Kebakalan | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 457.456.000 | 1.301.896.000 |
| 389 | Karanggayam | Karangrejo | 662.806.000 | - | - | 225.517.000 | 888.323.000 |
| 390 | Karanggayam | Wonotirto | 662.806.000 | - | - | 295.832.000 | 958.638.000 |
| 391 | Karanggayam | Kalibening | 662.806.000 | - | - | 454.476.000 | 1.117.282.000 |
| 392 | Karanggayam | Gunungsari | 662.806.000 | - | - | 422.326.000 | 1.085.132.000 |
| 393 | Karanggayam | Ginandong | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 394.393.000 | 1.238.833.000 |
| 394 | Karanggayam | Binangun | 662.806.000 | - | - | 203.130.000 | 865.936.000 |
| 395 | Karanggayam | Glontor | 662.806.000 | - | - | 851.471.000 | 1.514.277.000 |
| 396 | Karanggayam | Selogiri | 662.806.000 | - | - | 651.992.000 | 1.314.798.000 |
| 397 | Karanggayam | Giritirto | 662.806.000 | - | - | 694.504.000 | 1.357.310.000 |
| 398 | Sadang | Pucangan | 662.806.000 | - | - | 433.928.000 | 1.096.734.000 |
| 399 | Sadang | Seboro | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 1.228.335.000 | 2.072.775.000 |
| 400 | Sadang | Wonosari | 662.806.000 | - | - | 378.886.000 | 1.041.692.000 |
| 401 | Sadang | Sadangkulon | 662.806.000 | - | - | 375.897.000 | 1.038.703.000 |
| 402 | Sadang | Cangkring | 662.806.000 | - | - | 269.996.000 | 932.802.000 |
| 403 | Sadang | Sadangwetan | 662.806.000 | - | - | 161.756.000 | 824.562.000 |
| 404 | Sadang | Kedunggong | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 365.812.000 | 1.172.714.000 |
| 405 | Bonorowo | Patukrejo | 662.806.000 | - | - | 148.703.000 | 811.509.000 |
| 406 | Bonorowo | Ngasinan | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 144.536.000 | 951.438.000 |
| 407 | Bonorowo | Pujodadi | 662.806.000 | - | - | 135.432.000 | 798.238.000 |
| 408 | Bonorowo | Balorejo | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 160.092.000 | 966.994.000 |
| 409 | Bonorowo | Rowosari | 662.806.000 | - | - | 110.363.000 | 773.169.000 |
| 410 | Bonorowo | Tlogorejo | 662.806.000 | - | - | 145.628.000 | 808.434.000 |
| 411 | Bonorowo | Bonorowo | 662.806.000 | - | - | 151.140.000 | 813.946.000 |
| 412 | Bonorowo | Sirnoboyo | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 219.260.000 | 1.026.162.000 |
| 413 | Bonorowo | Bonjokkidul | 662.806.000 | - | - | 136.152.000 | 798.958.000 |
| 414 | Bonorowo | Bonjoklor | 662.806.000 | - | - | 209.667.000 | 872.473.000 |
| 415 | Bonorowo | Mrentul | 662.806.000 | - | - | 169.215.000 | 832.021.000 |
| 416 | Padureso | Pejengkolan | 662.806.000 | - | - | 151.572.000 | 814.378.000 |
| 417 | Padureso | Balingasal | 662.806.000 | - | - | 197.299.000 | 860.105.000 |
| 418 | Padureso | Merden | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 213.206.000 | 1.020.108.000 |
| 419 | Padureso | Kalijering | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 125.534.000 | 932.436.000 |
| 420 | Padureso | Kaligubug | 662.806.000 | - | - | 206.829.000 | 869.635.000 |
| 421 | Padureso | Sidototo | 662.806.000 | - | - | 172.380.000 | 835.186.000 |
| 422 | Padureso | Rahayu | 662.806.000 | - | - | 225.451.000 | 888.257.000 |
| 423 | Padureso | Sendangdalem | 662.806.000 | - | - | 374.224.000 | 1.037.030.000 |
| 424 | Padureso | Padureso | 662.806.000 | - | - | 169.150.000 | 831.956.000 |
| 425 | Poncowarno | Jatipurus | 662.806.000 | - | - | 170.965.000 | 833.771.000 |
| 426 | Poncowarno | Lerepkebumen | 662.806.000 | - | - | 163.649.000 | 826.455.000 |
| 427 | Poncowarno | Blater | 662.806.000 | - | - | 181.854.000 | 844.660.000 |
| 428 | Poncowarno | Poncowarno | 662.806.000 | - | - | 105.312.000 | 768.118.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | Poncowarno | Tegalrejo | 662.806.000 | - | - | 144.994.000 | 807.800.000 |
| 430 | Poncowarno | Jembangan | 662.806.000 | - | - | 236.125.000 | 898.931.000 |
| 431 | Poncowarno | Kedungdowo | 662.806.000 | - | - | 124.136.000 | 786.942.000 |
| 432 | Poncowarno | Karangtengah | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 212.211.000 | 1.019.113.000 |
| 433 | Poncowarno | Tirtomoyo | 662.806.000 | - | - | 262.334.000 | 925.140.000 |
| 434 | Poncowarno | Soka | 662.806.000 | - | - | 351.295.000 | 1.014.101.000 |
| 435 | Poncowarno | Kebapangan | 662.806.000 | - | - | 237.535.000 | 900.341.000 |
| 436 | Karangsambung | Widoro | 662.806.000 | - | - | 366.449.000 | 1.029.255.000 |
| 437 | Karangsambung | Seling | 662.806.000 | - | - | 185.987.000 | 848.793.000 |
| 438 | Karangsambung | Pencil | 662.806.000 | - | - | 136.995.000 | 799.801.000 |
| 439 | Karangsambung | Kedungwaru | 662.806.000 | - | - | 285.304.000 | 948.110.000 |
| 440 | Karangsambung | Kaligending | 662.806.000 | - | - | 510.166.000 | 1.172.972.000 |
| 441 | Karangsambung | Plumbon | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 840.343.000 | 1.684.783.000 |
| 442 | Karangsambung | Pujotirto | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 554.658.000 | 1.399.098.000 |
| 443 | Karangsambung | Wadasmalang | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 686.135.000 | 1.493.037.000 |
| 444 | Karangsambung | Tlepok | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 268.759.000 | 1.113.199.000 |
| 445 | Karangsambung | Kalisana | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 433.520.000 | 1.277.960.000 |
| 446 | Karangsambung | Langse | 662.806.000 | - | - | 388.295.000 | 1.051.101.000 |
| 447 | Karangsambung | Banioro | 662.806.000 | - | - | 235.409.000 | 898.215.000 |
| 448 | Karangsambung | Karangsambung | 662.806.000 | - | - | 571.206.000 | 1.234.012.000 |
| 449 | Karangsambung | Totogan | 662.806.000 | - | - | 437.011.000 | 1.099.817.000 |
| Total | | | 297.599.894.000 | 3.269.412.000 | 5.763.840.000 | 103.245.066.000 | 409.878.212.000 |

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

| No. | NAMA DESA | ALOKASI DASAR (AD) | ALOKASI AFIRMASI (AA) | ALOKASI KINERJA (AK) | ALOKASI FORMULA (AF) | JUMLAH PAGU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | KECAMATAN AYAH | | | | | |
| 1 | Argopeni | 662.806.000 | - | - | 193.412.000 | 856.218.000 |
| 2 | Karangduwur | 662.806.000 | - | - | 180.291.000 | 843.097.000 |
| 3 | Srati | 662.806.000 | - | - | 186.578.000 | 849.384.000 |
| 4 | Pasir | 662.806.000 | - | - | 160.416.000 | 823.222.000 |
| 5 | Jintung | 662.806.000 | - | - | 115.307.000 | 778.113.000 |
| 6 | Banjararjo | 662.806.000 | - | - | 209.079.000 | 871.885.000 |
| 7 | Argosari | 662.806.000 | - | - | 280.389.000 | 943.195.000 |
| 8 | Watukelir | 662.806.000 | - | - | 230.134.000 | 892.940.000 |
| 9 | Kalibangkang | 662.806.000 | - | - | 239.998.000 | 902.804.000 |
| 10 | Tlogosari | 662.806.000 | - | - | 289.062.000 | 951.868.000 |
| 11 | Kalipoh | 662.806.000 | - | - | 219.045.000 | 881.851.000 |
| 12 | Ayah | 662.806.000 | - | - | 91.188.000 | 753.994.000 |
| 13 | Candirenggo | 662.806.000 | - | - | 208.773.000 | 871.579.000 |
| 14 | Mangunweni | 662.806.000 | - | - | 256.276.000 | 919.082.000 |
| 15 | Jatijajar | 662.806.000 | - | - | 359.926.000 | 1.022.732.000 |
| 16 | Demangsari | 662.806.000 | - | - | 191.419.000 | 854.225.000 |
| 17 | Bulurejo | 662.806.000 | - | - | 192.445.000 | 855.251.000 |
| 18 | Kedungweru | 662.806.000 | - | - | 132.805.000 | 795.611.000 |
| | Jumlah | | | | | 15.667.051.000 |
| II. | KECAMATAN BUAYAN | | | | | |
| 1 | Karangbolong | 662.806.000 | - | - | 146.324.000 | 809.130.000 |
| 2 | Jladri | 662.806.000 | - | - | 252.450.000 | 915.256.000 |
| 3 | Adiwarno | 662.806.000 | - | - | 154.333.000 | 817.139.000 |
| 4 | Rangkah | 662.806.000 | - | - | 124.562.000 | 787.368.000 |
| 5 | Wonodadi | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 207.309.000 | 1.014.211.000 |
| 6 | Geblug | 662.806.000 | - | - | 100.936.000 | 763.742.000 |
| 7 | Rogodadi | 662.806.000 | - | - | 151.533.000 | 814.339.000 |
| 8 | Pakuran | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 318.016.000 | 1.162.456.000 |
| 9 | Buayan | 662.806.000 | - | - | 153.870.000 | 816.676.000 |
| 10 | Sikayu | 662.806.000 | - | - | 505.889.000 | 1.168.695.000 |
| 11 | Karangsari | 662.806.000 | - | - | 151.982.000 | 814.788.000 |
| 12 | Rogodono | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 228.543.000 | 1.072.983.000 |
| 13 | Banyumudal | 662.806.000 | - | - | 392.028.000 | 1.054.834.000 |
| 14 | Tugu | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 479.678.000 | 1.324.118.000 |
| 15 | Nogoraji | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 455.771.000 | 1.300.211.000 |
| 16 | Mergosono | 662.806.000 | - | - | 211.199.000 | 874.005.000 |
| 17 | Semampir | 662.806.000 | - | - | 217.881.000 | 880.687.000 |
| 18 | Jogomulyo | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 300.878.000 | 1.145.318.000 |
| 19 | Purbowangi | 662.806.000 | - | - | 285.017.000 | 947.823.000 |
| 20 | Jatiroto | 662.806.000 | - | - | 287.867.000 | 950.673.000 |
| | Jumlah | | | | | 19.434.452.000 |
| III. | KECAMATAN PURING | | | | | |
| 1 | Tambakmulyo | 662.806.000 | - | - | 562.827.000 | 1.225.633.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Surorejan | 662.806.000 | - | - | 359.891.000 | 1.022.697.000 |
| 3 | Waluyorejo | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 290.931.000 | 1.097.833.000 |
| 4 | Sidoharjo | 662.806.000 | - | - | 205.670.000 | 868.476.000 |
| 5 | Puliharjo | 662.806.000 | - | - | 275.618.000 | 938.424.000 |
| 6 | Purwosari | 662.806.000 | - | - | 210.743.000 | 873.549.000 |
| 7 | Arjowinangun | 662.806.000 | - | - | 145.924.000 | 808.730.000 |
| 8 | Krandegan | 662.806.000 | - | - | 340.440.000 | 1.003.246.000 |
| 9 | Kaleng | 662.806.000 | - | - | 217.712.000 | 880.518.000 |
| 10 | Tukinggedong | 662.806.000 | - | - | 142.319.000 | 805.125.000 |
| 11 | Purwoharjo | 662.806.000 | - | - | 109.392.000 | 772.198.000 |
| 12 | Banjarejo | 662.806.000 | - | - | 368.777.000 | 1.031.583.000 |
| 13 | Wetonkulon | 662.806.000 | - | - | 144.014.000 | 806.820.000 |
| 14 | Pesuruhan | 662.806.000 | - | - | 102.187.000 | 764.993.000 |
| 15 | Wetonwetan | 662.806.000 | - | - | 152.572.000 | 815.378.000 |
| 16 | Kedalemankulon | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 158.044.000 | 964.946.000 |
| 17 | Kedalemanwetan | 662.806.000 | - | - | 231.481.000 | 894.287.000 |
| 18 | Srusuhjurutengah | 662.806.000 | - | - | 173.914.000 | 836.720.000 |
| 19 | Sitiadi | 662.806.000 | - | - | 182.675.000 | 845.481.000 |
| 20 | Bumirejo | 662.806.000 | - | - | 213.036.000 | 875.842.000 |
| 21 | Madurejo | 662.806.000 | - | - | 189.811.000 | 852.617.000 |
| 22 | Sidobunder | 662.806.000 | - | - | 161.935.000 | 824.741.000 |
| 23 | Sidodadi | 662.806.000 | - | - | 189.483.000 | 852.289.000 |
|  | Jumlah |  |  |  |  | 20.662.126.000 |
| IV. | KECAMATAN PETANAHAN |  |  |  |  |  |
| 1 | Karangrejo | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 255.139.000 | 1.062.041.000 |
| 2 | Karanggadung | 662.806.000 | - | - | 187.965.000 | 850.771.000 |
| 3 | Tegalretno | 662.806.000 | - | - | 234.460.000 | 897.266.000 |
| 4 | Ampelsari | 662.806.000 | - | - | 168.063.000 | 830.869.000 |
| 5 | Munggu | 662.806.000 | - | - | 173.449.000 | 836.255.000 |
| 6 | Kewangunan | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 154.209.000 | 961.111.000 |
| 7 | Karangduwur | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 153.560.000 | 960.462.000 |
| 8 | Petanahan | 662.806.000 | - | - | 129.514.000 | 792.320.000 |
| 9 | Kebonsari | 662.806.000 | - | - | 109.127.000 | 771.933.000 |
| 10 | Grogolpenatus | 662.806.000 | - | - | 217.877.000 | 880.683.000 |
| 11 | Grogolbeningsari | 662.806.000 | - | - | 241.143.000 | 903.949.000 |
| 12 | Jogomertan | 662.806.000 | - | - | 191.622.000 | 854.428.000 |
| 13 | Tanjungsari | 662.806.000 | - | - | 254.881.000 | 917.687.000 |
| 14 | Sidomulyo | 662.806.000 | - | - | 146.303.000 | 809.109.000 |
| 15 | Grujugan | 662.806.000 | - | - | 135.669.000 | 798.475.000 |
| 16 | Kritig | 662.806.000 | - | - | 155.773.000 | 818.579.000 |
| 17 | Nampudadi | 662.806.000 | - | - | 157.642.000 | 820.448.000 |
| 18 | Tresnorejo | 662.806.000 | - | - | 106.161.000 | 768.967.000 |
| 19 | Podourip | 662.806.000 | - | - | 106.442.000 | 769.248.000 |
| 20 | Jatimulyo | 662.806.000 | - | - | 163.859.000 | 826.665.000 |
| 21 | Banjarwinangun | 662.806.000 | - | - | 171.225.000 | 834.031.000 |
|  | Jumlah |  |  |  |  | 17.965.297.000 |
| V. | KECAMATAN KLIRONG |  |  |  |  |  |
| 1 | Jogosimo | 662.806.000 | - | - | 272.255.000 | 935.061.000 |
| 2 | Tanggulangin | 662.806.000 | - | - | 320.217.000 | 983.023.000 |
| 3 | Pandanlor | 662.806.000 | - | - | 161.215.000 | 824.021.000 |
| 4 | Tambakprogaten | 662.806.000 | - | - | 233.955.000 | 896.761.000 |
| 5 | Gebangsari | 662.806.000 | - | - | 231.629.000 | 894.435.000 |
| 6 | Klegenrejo | 662.806.000 | - | - | 235.369.000 | 898.175.000 |
| 7 | Bendogarap | 662.806.000 | - | - | 133.810.000 | 796.616.000 |
| 8 | Kedungsari | 662.806.000 | - | - | 212.189.000 | 874.995.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jerukagung | 662.806.000 | - | - | 170.473.000 | 833.279.000 |
| 10 | Klegenwonosari | 662.806.000 | - | - | 138.522.000 | 801.328.000 |
| 11 | Klirong | 662.806.000 | - | - | 96.611.000 | 759.417.000 |
| 12 | Kaliwungu | 662.806.000 | - | - | 109.833.000 | 772.639.000 |
| 13 | Jatimalang | 662.806.000 | - | - | 130.642.000 | 793.448.000 |
| 14 | Karangglonggong | 662.806.000 | - | - | 91.324.000 | 754.130.000 |
| 15 | Ranterejo | 662.806.000 | - | - | 164.262.000 | 827.068.000 |
| 16 | Wotbuwono | 662.806.000 | - | - | 153.447.000 | 816.253.000 |
| 17 | Tambakagung | 662.806.000 | - | - | 163.519.000 | 826.325.000 |
| 18 | Sitirejo | 662.806.000 | - | - | 110.513.000 | 773.319.000 |
| 19 | Gadungrejo | 662.806.000 | - | - | 232.805.000 | 895.611.000 |
| 20 | Dorowati | 662.806.000 | - | - | 181.564.000 | 844.370.000 |
| 21 | Bumiharjo | 662.806.000 | - | - | 205.381.000 | 868.187.000 |
| 22 | Kebadongan | 662.806.000 | - | - | 167.243.000 | 830.049.000 |
| 23 | Podoluhur | 662.806.000 | - | - | 204.177.000 | 866.983.000 |
| 24 | Kedungwinangun | 662.806.000 | - | - | 267.942.000 | 930.748.000 |
|  | Jumlah |  |  |  |  | 20.296.241.000 |
| VI. | KECAMATAN BULUSPESANTREN |  |  |  |  |  |
| 1 | Ayamputih | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 284.895.000 | 1.091.797.000 |
| 2 | Setrojenar | 662.806.000 | - | - | 152.129.000 | 814.935.000 |
| 3 | Brecong | 662.806.000 | - | - | 315.423.000 | 978.229.000 |
| 4 | Banjurpasar | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 183.467.000 | 990.369.000 |
| 5 | Indrosari | 662.806.000 | - | - | 134.794.000 | 797.600.000 |
| 6 | Buluspesantren | 662.806.000 | - | - | 150.105.000 | 812.911.000 |
| 7 | Banjurmukadan | 662.806.000 | - | - | 99.691.000 | 762.497.000 |
| 8 | Waluyo | 662.806.000 | - | - | 239.355.000 | 902.161.000 |
| 9 | Bocor | 662.806.000 | - | - | 206.780.000 | 869.586.000 |
| 10 | Maduretno | 662.806.000 | - | - | 169.175.000 | 831.981.000 |
| 11 | Ambalkumolo | 662.806.000 | - | - | 158.565.000 | 821.371.000 |
| 12 | Rantewringin | 662.806.000 | - | - | 202.918.000 | 865.724.000 |
| 13 | Tambakrejo | 662.806.000 | - | - | 108.316.000 | 771.122.000 |
| 14 | Sangubanyu | 662.806.000 | - | - | 211.795.000 | 874.601.000 |
| 15 | Arjowinangun | 662.806.000 | - | - | 124.544.000 | 787.350.000 |
| 16 | Ampih | 662.806.000 | - | - | 184.009.000 | 846.815.000 |
| 17 | Jogopaten | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 185.546.000 | 992.448.000 |
| 18 | Kloposawit | 662.806.000 | - | - | 231.061.000 | 893.867.000 |
| 19 | Sidomoro | 662.806.000 | - | - | 307.048.000 | 969.854.000 |
| 20 | Tanjungrejo | 662.806.000 | - | - | 146.649.000 | 809.455.000 |
| 21 | Tanjungsari | 662.806.000 | - | - | 115.914.000 | 778.720.000 |
|  | Jumlah |  |  |  |  | 18.263.393.000 |
| VII. | KECAMATAN AMBAL |  |  |  |  |  |
| 1 | Entak | 662.806.000 | - | - | 214.753.000 | 877.559.000 |
| 2 | Plempukan Kembaran | 662.806.000 | - | - | 112.959.000 | 775.765.000 |
| 3 | Kenoyojayan | 662.806.000 | - | - | 147.645.000 | 810.451.000 |
| 4 | Ambalresmi | 662.806.000 | - | - | 240.228.000 | 903.034.000 |
| 5 | Kaibonpetangkuran | 662.806.000 | - | - | 178.185.000 | 840.991.000 |
| 6 | Kaibon | 662.806.000 | - | - | 184.693.000 | 847.499.000 |
| 7 | Sumberjati | 662.806.000 | - | - | 208.319.000 | 871.125.000 |
| 8 | Blengorwetan | 662.806.000 | - | - | 107.834.000 | 770.640.000 |
| 9 | Blengorkulon | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 179.388.000 | 986.290.000 |
| 10 | Benerwetan | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 158.746.000 | 965.648.000 |
| 11 | Benerkulon | 662.806.000 | - | - | 311.525.000 | 974.331.000 |
| 12 | Ambalkliwonan | 662.806.000 | - | - | 179.112.000 | 841.918.000 |
| 13 | Pasarsenen | 662.806.000 | - | - | 204.786.000 | 867.592.000 |
| 14 | Pucangan | 662.806.000 | - | - | 120.406.000 | 783.212.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ambalkebrek | 662.806.000 | - | - | 181.323.000 | 844.129.000 |
| 16 | Gondanglegi | 662.806.000 | - | - | 227.402.000 | 890.208.000 |
| 17 | Banjarsari | 662.806.000 | - | - | 101.653.000 | 764.459.000 |
| 18 | Lajer | 662.806.000 | - | - | 128.979.000 | 791.785.000 |
| 19 | Singosari | 662.806.000 | - | - | 151.918.000 | 814.724.000 |
| 20 | Sidoluhur | 662.806.000 | - | - | 217.746.000 | 880.552.000 |
| 21 | Sinungrejo | 662.806.000 | - | - | 121.051.000 | 783.857.000 |
| 22 | Ambarwinangun | 662.806.000 | - | - | 128.070.000 | 790.876.000 |
| 23 | Peneket | 662.806.000 | - | - | 125.425.000 | 788.231.000 |
| 24 | Sidorejo | 662.806.000 | - | - | 114.812.000 | 777.618.000 |
| 25 | Sidomulyo | 662.806.000 | - | - | 135.869.000 | 798.675.000 |
| 26 | Sidomukti | 662.806.000 | - | - | 183.416.000 | 846.222.000 |
| 27 | Prasutan | 662.806.000 | - | - | 114.542.000 | 777.348.000 |
| 28 | Kradenan | 662.806.000 | - | - | 129.962.000 | 792.768.000 |
| 29 | Pagedangan | 662.806.000 | - | - | 139.015.000 | 801.821.000 |
| 30 | Surobayan | 662.806.000 | - | - | 134.864.000 | 797.670.000 |
| 31 | Dukuhrejosari | 662.806.000 | - | - | 144.307.000 | 807.113.000 |
| 32 | Kembangsawit | 662.806.000 | - | - | 84.669.000 | 747.475.000 |
|  | Jumlah |  |  |  |  | 26.611.586.000 |
| VIII. | KECAMATAN MIRIT |  |  |  |  |  |
| 1 | Miritpetikusan | 662.806.000 | - | - | 159.370.000 | 822.176.000 |
| 2 | Tlogodepok | 662.806.000 | - | - | 195.301.000 | 858.107.000 |
| 3 | Mirit | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 161.245.000 | 968.147.000 |
| 4 | Tlogopragoto | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 144.656.000 | 951.558.000 |
| 5 | Lembupurwo | 662.806.000 | - | - | 321.974.000 | 984.780.000 |
| 6 | Wiromartan | 662.806.000 | - | - | 191.210.000 | 854.016.000 |
| 7 | Rowo | 662.806.000 | - | - | 140.850.000 | 803.656.000 |
| 8 | Singoyudan | 662.806.000 | - | - | 165.697.000 | 828.503.000 |
| 9 | Wergonayan | 662.806.000 | - | - | 160.285.000 | 823.091.000 |
| 10 | Selotumpeng | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 224.306.000 | 1.031.208.000 |
| 11 | Sitibentar | 662.806.000 | - | - | 204.981.000 | 867.787.000 |
| 12 | Karanggede | 662.806.000 | - | - | 132.173.000 | 794.979.000 |
| 13 | Kertodeso | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 242.322.000 | 1.049.224.000 |
| 14 | Patukrejomulyo | 662.806.000 | - | - | 158.713.000 | 821.519.000 |
| 15 | Patukgawemulyo | 662.806.000 | - | - | 169.096.000 | 831.902.000 |
| 16 | Mangunranan | 662.806.000 | - | - | 158.233.000 | 821.039.000 |
| 17 | Pekutan | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 156.390.000 | 963.292.000 |
| 18 | Wirogaten | 662.806.000 | - | - | 262.141.000 | 924.947.000 |
| 19 | Winong | 662.806.000 | - | - | 87.719.000 | 750.525.000 |
| 20 | Ngabean | 662.806.000 | - | - | 274.241.000 | 937.047.000 |
| 21 | Sarwogadung | 662.806.000 | - | - | 203.937.000 | 866.743.000 |
| 22 | Krubungan | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 124.700.000 | 931.602.000 |
|  | Jumlah |  |  |  |  | 19.485.848.000 |
| IX. | KECAMATAN PREMBUN |  |  |  |  |  |
| 1 | Tersobo | 662.806.000 | - | - | 127.237.000 | 790.043.000 |
| 2 | Prembun | 662.806.000 | - | - | 124.302.000 | 787.108.000 |
| 3 | Kabekelan | 662.806.000 | - | - | 114.893.000 | 777.699.000 |
| 4 | Tunggalroso | 662.806.000 | - | - | 146.727.000 | 809.533.000 |
| 5 | Kedungwaru | 662.806.000 | - | - | 250.557.000 | 913.363.000 |
| 6 | Bagung | 662.806.000 | - | - | 113.534.000 | 776.340.000 |
| 7 | Sidogede | 662.806.000 | - | - | 333.829.000 | 996.635.000 |
| 8 | Sembirkadipaten | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 141.639.000 | 948.541.000 |
| 9 | Kedungbulus | 662.806.000 | - | - | 136.032.000 | 798.838.000 |
| 10 | Mulyosri | 662.806.000 | - | - | 158.403.000 | 821.209.000 |
| 11 | Pesuningan | 662.806.000 | - | - | 138.615.000 | 801.421.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Pecarikan | 662.806.000 | - | - | 118.982.000 | 781.788.000 |
| 13 | Kabuaran | 662.806.000 | - | - | 196.946.000 | 859.752.000 |
| | Jumlah | | | | | 10.862.270.000 |
| X. | KECAMATAN KUTOWINANGUN | | | | | |
| 1 | Pekunden | 662.806.000 | - | - | 149.891.000 | 812.697.000 |
| 2 | Tanjungmeru | 662.806.000 | - | - | 134.034.000 | 796.840.000 |
| 3 | Kuwarisan | 662.806.000 | - | - | 112.498.000 | 775.304.000 |
| 4 | Kutowinangun | 662.806.000 | - | - | 115.304.000 | 778.110.000 |
| 5 | Lundong | 662.806.000 | - | - | 174.458.000 | 837.264.000 |
| 6 | Mekarsari | 662.806.000 | - | - | 213.833.000 | 876.639.000 |
| 7 | Babadsari | 662.806.000 | - | - | 183.501.000 | 846.307.000 |
| 8 | Ungaran | 662.806.000 | - | - | 119.210.000 | 782.016.000 |
| 9 | Mrinen | 662.806.000 | - | - | 118.833.000 | 781.639.000 |
| 10 | Pejagatan | 662.806.000 | - | - | 232.783.000 | 895.589.000 |
| 11 | Triwarno | 662.806.000 | - | - | 207.014.000 | 869.820.000 |
| 12 | Korowelang | 662.806.000 | - | - | 163.031.000 | 825.837.000 |
| 13 | Jlegiwinangun | 662.806.000 | - | - | 238.760.000 | 901.566.000 |
| 14 | Lumbu | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 286.227.000 | 1.130.667.000 |
| 15 | Tanjungsari | 662.806.000 | - | - | 236.417.000 | 899.223.000 |
| 16 | Kaliputih | 662.806.000 | - | - | 140.894.000 | 803.700.000 |
| 17 | Tanjungseto | 662.806.000 | - | - | 132.816.000 | 795.622.000 |
| 18 | Pesalakan | 662.806.000 | - | - | 139.712.000 | 802.518.000 |
| 19 | Karangsari | 662.806.000 | - | - | 221.601.000 | 884.407.000 |
| | Jumlah | | | | | 16.095.765.000 |
| XI. | KECAMATAN ALIAN | | | | | |
| 1 | Bojongsari | 662.806.000 | - | - | 314.159.000 | 976.965.000 |
| 2 | Surotrunan | 662.806.000 | - | - | 363.866.000 | 1.026.672.000 |
| 3 | Kambangsari | 662.806.000 | - | - | 138.436.000 | 801.242.000 |
| 4 | Jatimulyo | 662.806.000 | - | - | 194.062.000 | 856.868.000 |
| 5 | Tanuharjo | 662.806.000 | - | - | 190.998.000 | 853.804.000 |
| 6 | Karangtanjung | 662.806.000 | - | - | 220.042.000 | 882.848.000 |
| 7 | Kemangguan | 662.806.000 | - | - | 434.329.000 | 1.097.135.000 |
| 8 | Kalijaya | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 384.049.000 | 1.190.951.000 |
| 9 | Karangkembang | 662.806.000 | - | - | 237.962.000 | 900.768.000 |
| 10 | Seliling | 662.806.000 | - | - | 413.978.000 | 1.076.784.000 |
| 11 | Tlogowulung | 662.806.000 | - | - | 186.435.000 | 849.241.000 |
| 12 | Kaliputih | 662.806.000 | - | - | 391.740.000 | 1.054.546.000 |
| 13 | Wonokromo | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 577.577.000 | 1.384.479.000 |
| 14 | Sawangan | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 263.189.000 | 1.070.091.000 |
| 15 | Kalirancang | 662.806.000 | - | - | 345.976.000 | 1.008.782.000 |
| 16 | Krakal | 662.806.000 | - | - | 556.410.000 | 1.219.216.000 |
| | Jumlah | | | | | 16.250.392.000 |
| XII. | KECAMATAN KEBUMEN | | | | | |
| 1 | Muktisari | 662.806.000 | - | - | 212.157.000 | 874.963.000 |
| 2 | Murtirejo | 662.806.000 | - | - | 275.830.000 | 938.636.000 |
| 3 | Depokrejo | 662.806.000 | - | - | 236.810.000 | 899.616.000 |
| 4 | Mengkowo | 662.806.000 | - | - | 135.275.000 | 798.081.000 |
| 5 | Gesikan | 662.806.000 | - | - | 175.852.000 | 838.658.000 |
| 6 | Kalibagor | 662.806.000 | - | - | 279.299.000 | 942.105.000 |
| 7 | Argopeni | 662.806.000 | - | - | 209.641.000 | 872.447.000 |
| 8 | Jatisari | 662.806.000 | - | - | 266.824.000 | 929.630.000 |
| 9 | Kalirejo | 662.806.000 | - | - | 206.449.000 | 869.255.000 |
| 10 | Adikarso | 662.806.000 | - | - | 197.687.000 | 860.493.000 |
| 11 | Kembaran | 662.806.000 | - | - | 104.288.000 | 767.094.000 |
| 12 | Sumberadi | 662.806.000 | - | - | 165.647.000 | 828.453.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Wonosari | 662.806.000 | - | - | 242.660.000 | 905.466.000 |
| 14 | Roworejo | 662.806.000 | - | - | 223.361.000 | 886.167.000 |
| 15 | Tanahsari | 662.806.000 | - | - | 264.687.000 | 927.493.000 |
| 16 | Bandung | 662.806.000 | - | - | 253.247.000 | 916.053.000 |
| 17 | Candimulyo | 662.806.000 | - | - | 188.603.000 | 851.409.000 |
| 18 | Kalijirek | 662.806.000 | - | - | 200.713.000 | 863.519.000 |
| 19 | Candiwulan | 662.806.000 | - | - | 178.224.000 | 841.030.000 |
| 20 | Kawedusan | 662.806.000 | - | - | 104.334.000 | 767.140.000 |
| 21 | Kutosari | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 136.962.000 | 943.864.000 |
| 22 | Gemeksekti | 662.806.000 | - | - | 299.477.000 | 962.283.000 |
| 23 | Karangsari | 662.806.000 | - | - | 255.975.000 | 918.781.000 |
| 24 | Jemur | 662.806.000 | - | - | 237.453.000 | 900.259.000 |
| | Jumlah | | | | | 21.102.895.000 |
| XIII. | KECAMATAN PEJAGOAN | | | | | |
| 1 | Logede | 662.806.000 | - | - | 170.617.000 | 833.423.000 |
| 2 | Kewayuhan | 662.806.000 | - | - | 219.845.000 | 882.651.000 |
| 3 | Kedawung | 662.806.000 | - | - | 332.726.000 | 995.532.000 |
| 4 | Pejagoan | 662.806.000 | - | - | 231.041.000 | 893.847.000 |
| 5 | Kebulusan | 662.806.000 | - | - | 213.413.000 | 876.219.000 |
| 6 | Aditirto | 662.806.000 | - | - | 202.901.000 | 865.707.000 |
| 7 | Karangpoh | 662.806.000 | - | - | 253.929.000 | 916.735.000 |
| 8 | Jemur | 662.806.000 | - | - | 402.129.000 | 1.064.935.000 |
| 9 | Prigi | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 264.104.000 | 1.071.006.000 |
| 10 | Kebagoran | 662.806.000 | - | - | 199.320.000 | 862.126.000 |
| 11 | Pengaringan | 662.806.000 | - | - | 127.625.000 | 790.431.000 |
| 12 | Peniron | 662.806.000 | - | - | 826.429.000 | 1.489.235.000 |
| 13 | Watulawang | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 188.739.000 | 995.641.000 |
| | Jumlah | | | | | 12.537.488.000 |
| XIV. | KECAMATAN SRUWENG | | | | | |
| 1 | Menganti | 662.806.000 | - | - | 184.374.000 | 847.180.000 |
| 2 | Trikarso | 662.806.000 | - | - | 194.105.000 | 856.911.000 |
| 3 | Sidoarjo | 662.806.000 | - | - | 184.319.000 | 847.125.000 |
| 4 | Giwangretno | 662.806.000 | - | - | 184.126.000 | 846.932.000 |
| 5 | Jabres | 662.806.000 | - | - | 81.828.000 | 744.634.000 |
| 6 | Sruweng | 662.806.000 | - | - | 113.064.000 | 775.870.000 |
| 7 | Karanggedang | 662.806.000 | - | - | 177.262.000 | 840.068.000 |
| 8 | Purwodeso | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 104.939.000 | 911.841.000 |
| 9 | Klepusanggar | 662.806.000 | - | - | 105.955.000 | 768.761.000 |
| 10 | Tanggeran | 662.806.000 | - | - | 225.142.000 | 887.948.000 |
| 11 | Karangsari | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 108.200.000 | 915.102.000 |
| 12 | Karangpule | 662.806.000 | - | - | 208.317.000 | 871.123.000 |
| 13 | Pakuran | 662.806.000 | - | - | 286.953.000 | 949.759.000 |
| 14 | Pengempon | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 562.484.000 | 1.406.924.000 |
| 15 | Kejawang | 662.806.000 | - | - | 162.148.000 | 824.954.000 |
| 16 | Karangjambu | 662.806.000 | - | - | 135.930.000 | 798.736.000 |
| 17 | Sidoagung | 662.806.000 | - | - | 411.508.000 | 1.074.314.000 |
| 18 | Penusupan | 662.806.000 | - | - | 151.312.000 | 814.118.000 |
| 19 | Donosari | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 226.171.000 | 1.070.611.000 |
| 20 | Pandansari | 662.806.000 | - | - | 710.679.000 | 1.373.485.000 |
| 21 | Condongcampur | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 212.563.000 | 1.057.003.000 |
| | Jumlah | | | | | 19.483.399.000 |
| XV. | KECAMATAN ADIMULYO | | | | | |
| 1 | Sugihwaras | 662.806.000 | - | - | 173.971.000 | 836.777.000 |
| 2 | Tambaharjo | 662.806.000 | - | - | 170.483.000 | 833.289.000 |
| 3 | Tepakyang | 662.806.000 | - | - | 152.340.000 | 815.146.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sidomulyo | 662.806.000 | - | - | 116.799.000 | 779.605.000 |
| 5 | Wajasari | 662.806.000 | - | - | 94.093.000 | 756.899.000 |
| 6 | Candiwulan | 662.806.000 | - | - | 113.978.000 | 776.784.000 |
| 7 | Adikarto | 662.806.000 | - | - | 98.775.000 | 761.581.000 |
| 8 | Adimulyo | 662.806.000 | - | - | 135.516.000 | 798.322.000 |
| 9 | Temanggal | 662.806.000 | - | - | 86.746.000 | 749.552.000 |
| 10 | Joho | 662.806.000 | - | - | 96.732.000 | 759.538.000 |
| 11 | Adiluhur | 662.806.000 | - | - | 129.795.000 | 792.601.000 |
| 12 | Tegalsari | 662.806.000 | - | - | 152.526.000 | 815.332.000 |
| 13 | Sekarteja | 662.806.000 | - | - | 115.298.000 | 778.104.000 |
| 14 | Kemujan | 662.806.000 | - | - | 111.590.000 | 774.396.000 |
| 15 | Mangunharjo | 662.806.000 | - | - | 114.098.000 | 776.904.000 |
| 16 | Banyuroto | 662.806.000 | - | - | 149.043.000 | 811.849.000 |
| 17 | Meles | 662.806.000 | - | - | 131.905.000 | 794.711.000 |
| 18 | Caruban | 662.806.000 | - | - | 124.931.000 | 787.737.000 |
| 19 | Bonjok | 662.806.000 | - | - | 127.476.000 | 790.282.000 |
| 20 | Arjomulyo | 662.806.000 | - | - | 117.641.000 | 780.447.000 |
| 21 | Arjosari | 662.806.000 | - | - | 106.054.000 | 768.860.000 |
| 22 | Pekuwon | 662.806.000 | - | - | 131.516.000 | 794.322.000 |
| 23 | Sidomukti | 662.806.000 | - | - | 144.888.000 | 807.694.000 |
| | Jumlah | | | | | 18.140.732.000 |
| XVI. | KECAMATAN KUWARASAN | | | | | |
| 1 | Kamulyan | 662.806.000 | - | - | 110.862.000 | 773.668.000 |
| 2 | Sidomukti | 662.806.000 | - | - | 189.898.000 | 852.704.000 |
| 3 | Tambaksari | 662.806.000 | - | - | 106.552.000 | 769.358.000 |
| 4 | Kalipurwo | 662.806.000 | - | - | 163.084.000 | 825.890.000 |
| 5 | Purwodadi | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 150.146.000 | 957.048.000 |
| 6 | Pondokgebangsari | 662.806.000 | - | - | 114.847.000 | 777.653.000 |
| 7 | Kuwarasan | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 147.410.000 | 954.312.000 |
| 8 | Harjodowo | 662.806.000 | - | - | 152.362.000 | 815.168.000 |
| 9 | Lemahduwur | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 218.140.000 | 1.062.580.000 |
| 10 | Madureso | 662.806.000 | - | - | 257.053.000 | 919.859.000 |
| 11 | Mangli | 662.806.000 | - | - | 142.198.000 | 805.004.000 |
| 12 | Gandusari | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 188.053.000 | 994.955.000 |
| 13 | Ori | 662.806.000 | - | - | 140.531.000 | 803.337.000 |
| 14 | Serut | 662.806.000 | - | - | 96.680.000 | 759.486.000 |
| 15 | Banjarejo | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 150.143.000 | 957.045.000 |
| 16 | Gumawang | 662.806.000 | - | - | 167.273.000 | 830.079.000 |
| 17 | Wonoyoso | 662.806.000 | - | - | 196.325.000 | 859.131.000 |
| 18 | Gunungmujil | 662.806.000 | - | - | 270.839.000 | 933.645.000 |
| 19 | Kuwaru | 662.806.000 | - | - | 125.199.000 | 788.005.000 |
| 20 | Bendungan | 662.806.000 | - | - | 145.660.000 | 808.466.000 |
| 21 | Jatimulyo | 662.806.000 | - | - | 122.355.000 | 785.161.000 |
| 22 | Sawangan | 662.806.000 | - | - | 160.298.000 | 823.104.000 |
| | Jumlah | | | | | 18.855.658.000 |
| XVII. | KECAMATAN ROWOKELE | | | | | |
| 1 | Redisari | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 224.979.000 | 1.031.881.000 |
| 2 | Kalisari | 662.806.000 | - | - | 297.779.000 | 960.585.000 |
| 3 | Pringtutul | 662.806.000 | - | - | 321.570.000 | 984.376.000 |
| 4 | Rowokele | 662.806.000 | - | - | 241.304.000 | 904.110.000 |
| 5 | Bumiagung | 662.806.000 | - | - | 361.870.000 | 1.024.676.000 |
| 6 | Jatiluhur | 662.806.000 | - | - | 211.321.000 | 874.127.000 |
| 7 | Kretek | 662.806.000 | - | - | 323.288.000 | 986.094.000 |
| 8 | Sukomulyo | 662.806.000 | - | - | 459.093.000 | 1.121.899.000 |
| 9 | Giyanti | 662.806.000 | - | - | 606.581.000 | 1.269.387.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Wonoharjo | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 790.212.000 | 1.597.114.000 |
| 11 | Wagirpandan | 662.806.000 | - | - | 483.668.000 | 1.146.474.000 |
| | Jumlah | | | | | 11.900.723.000 |
| XVIII. | KECAMATAN SEMPOR | | | | | |
| 1 | Sidoharum | 662.806.000 | - | - | 366.229.000 | 1.029.035.000 |
| 2 | Selokerto | 662.806.000 | - | - | 187.348.000 | 850.154.000 |
| 3 | Kalibeji | 662.806.000 | - | - | 441.897.000 | 1.104.703.000 |
| 4 | Jatinegara | 662.806.000 | - | - | 266.173.000 | 928.979.000 |
| 5 | Bejiruyung | 662.806.000 | - | - | 174.420.000 | 837.226.000 |
| 6 | Pekuncen | 662.806.000 | - | - | 202.917.000 | 865.723.000 |
| 7 | Kedungjati | 662.806.000 | - | - | 247.971.000 | 910.777.000 |
| 8 | Semali | 662.806.000 | - | - | 255.481.000 | 918.287.000 |
| 9 | Bonosari | 662.806.000 | - | - | 302.790.000 | 965.596.000 |
| 10 | Sempor | 662.806.000 | - | - | 435.930.000 | 1.098.736.000 |
| 11 | Tunjungseto | 662.806.000 | - | - | 549.272.000 | 1.212.078.000 |
| 12 | Sampang | 662.806.000 | - | - | 804.567.000 | 1.467.373.000 |
| 13 | Donorejo | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 636.659.000 | 1.481.099.000 |
| 14 | Kedungwringin | 662.806.000 | - | - | 754.328.000 | 1.417.134.000 |
| 15 | Kenteng | 662.806.000 | - | - | 446.733.000 | 1.109.539.000 |
| 16 | Somagede | 662.806.000 | - | - | 655.546.000 | 1.318.352.000 |
| | Jumlah | | | | | 17.514.791.000 |
| XIX. | KECAMATAN GOMBONG | | | | | |
| 1 | Kalitengah | 662.806.000 | - | - | 231.520.000 | 894.326.000 |
| 2 | Kemukus | 662.806.000 | - | - | 167.832.000 | 830.638.000 |
| 3 | Banjarsari | 662.806.000 | - | - | 128.265.000 | 791.071.000 |
| 4 | Panjangsari | 662.806.000 | - | - | 115.366.000 | 778.172.000 |
| 5 | Patemon | 662.806.000 | - | - | 151.062.000 | 813.868.000 |
| 6 | Kedungpuji | 662.806.000 | - | - | 130.185.000 | 792.991.000 |
| 7 | Wero | 662.806.000 | - | - | 96.371.000 | 759.177.000 |
| 8 | Semondo | 662.806.000 | - | - | 167.031.000 | 829.837.000 |
| 9 | Semanding | 662.806.000 | - | - | 224.354.000 | 887.160.000 |
| 10 | Sidayu | 662.806.000 | - | - | 78.767.000 | 741.573.000 |
| 11 | Wonosigro | 662.806.000 | - | - | 146.158.000 | 808.964.000 |
| 12 | Klopogodo | 662.806.000 | - | - | 244.734.000 | 907.540.000 |
| | Jumlah | | | | | 9.835.317.000 |
| XX. | KECAMATAN KARANGANYAR | | | | | |
| 1 | Sidomulyo | 662.806.000 | - | - | 98.859.000 | 761.665.000 |
| 2 | Candi | 662.806.000 | - | - | 207.327.000 | 870.133.000 |
| 3 | Giripurno | 662.806.000 | - | - | 288.638.000 | 951.444.000 |
| 4 | Karangkemiri | 662.806.000 | - | - | 149.077.000 | 811.883.000 |
| 5 | Wonorejo | 662.806.000 | - | - | 290.357.000 | 953.163.000 |
| 6 | Grenggeng | 662.806.000 | - | - | 304.149.000 | 966.955.000 |
| 7 | Pohkumbang | 662.806.000 | - | - | 378.030.000 | 1.040.836.000 |
| | Jumlah | | | | | 6.356.079.000 |
| XXI. | KECAMATAN KARANGGAYAM | | | | | |
| 1 | Karanggayam | 662.806.000 | - | - | 584.748.000 | 1.247.554.000 |
| 2 | Kajoran | 662.806.000 | - | - | 501.826.000 | 1.164.632.000 |
| 3 | Karangtengah | 662.806.000 | - | - | 169.204.000 | 832.010.000 |
| 4 | Karangmojo | 662.806.000 | - | - | 208.448.000 | 871.254.000 |
| 5 | Penimbun | 662.806.000 | - | - | 351.509.000 | 1.014.315.000 |
| 6 | Kalirejo | 662.806.000 | - | - | 542.922.000 | 1.205.728.000 |
| 7 | Pagebangan | 662.806.000 | - | - | 180.764.000 | 843.570.000 |
| 8 | Clapar | 662.806.000 | - | - | 341.711.000 | 1.004.517.000 |
| 9 | Logandu | 662.806.000 | - | - | 669.958.000 | 1.332.764.000 |
| 10 | Kebakalan | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 457.456.000 | 1.301.896.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Karangrejo | 662.806.000 | - | - | 225.517.000 | 888.323.000 |
| 12 | Wonotirto | 662.806.000 | - | - | 295.832.000 | 958.638.000 |
| 13 | Kalibening | 662.806.000 | - | - | 454.476.000 | 1.117.282.000 |
| 14 | Gunungsari | 662.806.000 | - | - | 422.326.000 | 1.085.132.000 |
| 15 | Ginandong | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 394.393.000 | 1.238.833.000 |
| 16 | Binangun | 662.806.000 | - | - | 203.130.000 | 865.936.000 |
| 17 | Glontor | 662.806.000 | - | - | 851.471.000 | 1.514.277.000 |
| 18 | Selogiri | 662.806.000 | - | - | 651.992.000 | 1.314.798.000 |
| 19 | Giritirto | 662.806.000 | - | - | 694.504.000 | 1.357.310.000 |
| | Jumlah | | | | | 21.158.769.000 |
| XXII. | KECAMATAN SADANG | | | | | |
| 1 | Pucangan | 662.806.000 | - | - | 433.928.000 | 1.096.734.000 |
| 2 | Seboro | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 1.228.335.000 | 2.072.775.000 |
| 3 | Wonosari | 662.806.000 | - | - | 378.886.000 | 1.041.692.000 |
| 4 | Sadangkulon | 662.806.000 | - | - | 375.897.000 | 1.038.703.000 |
| 5 | Cangkring | 662.806.000 | - | - | 269.996.000 | 932.802.000 |
| 6 | Sadangwetan | 662.806.000 | - | - | 161.756.000 | 824.562.000 |
| 7 | Kedunggong | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 365.812.000 | 1.172.714.000 |
| | Jumlah | | | | | 8.179.982.000 |
| XXIII. | KECAMATAN BONOROWO | | | | | |
| 1 | Patukrejo | 662.806.000 | - | - | 148.703.000 | 811.509.000 |
| 2 | Ngasinan | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 144.536.000 | 951.438.000 |
| 3 | Pujodadi | 662.806.000 | - | - | 135.432.000 | 798.238.000 |
| 4 | Balorejo | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 160.092.000 | 966.994.000 |
| 5 | Rowosari | 662.806.000 | - | - | 110.363.000 | 773.169.000 |
| 6 | Tlogorejo | 662.806.000 | - | - | 145.628.000 | 808.434.000 |
| 7 | Bonorowo | 662.806.000 | - | - | 151.140.000 | 813.946.000 |
| 8 | Sirnoboyo | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 219.260.000 | 1.026.162.000 |
| 9 | Bonjokkidul | 662.806.000 | - | - | 136.152.000 | 798.958.000 |
| 10 | Bonjoklor | 662.806.000 | - | - | 209.667.000 | 872.473.000 |
| 11 | Mrentul | 662.806.000 | - | - | 169.215.000 | 832.021.000 |
| | Jumlah | | | | | 9.453.342.000 |
| XXIV. | KECAMATAN PADURESO | | | | | |
| 1 | Pejengkolan | 662.806.000 | - | - | 151.572.000 | 814.378.000 |
| 2 | Balingasal | 662.806.000 | - | - | 197.299.000 | 860.105.000 |
| 3 | Merden | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 213.206.000 | 1.020.108.000 |
| 4 | Kalijering | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 125.534.000 | 932.436.000 |
| 5 | Kaligubug | 662.806.000 | - | - | 206.829.000 | 869.635.000 |
| 6 | Sidototo | 662.806.000 | - | - | 172.380.000 | 835.186.000 |
| 7 | Rahayu | 662.806.000 | - | - | 225.451.000 | 888.257.000 |
| 8 | Sendangdalem | 662.806.000 | - | - | 374.224.000 | 1.037.030.000 |
| 9 | Padureso | 662.806.000 | - | - | 169.150.000 | 831.956.000 |
| | Jumlah | | | | | 8.089.091.000 |
| XXV. | KECAMATAN PONCOWARNO | | | | | |
| 1 | Jatipurus | 662.806.000 | - | - | 170.965.000 | 833.771.000 |
| 2 | Lerepkebumen | 662.806.000 | - | - | 163.649.000 | 826.455.000 |
| 3 | Blater | 662.806.000 | - | - | 181.854.000 | 844.660.000 |
| 4 | Poncowarno | 662.806.000 | - | - | 105.312.000 | 768.118.000 |
| 5 | Tegalrejo | 662.806.000 | - | - | 144.994.000 | 807.800.000 |
| 6 | Jembangan | 662.806.000 | - | - | 236.125.000 | 898.931.000 |
| 7 | Kedungdowo | 662.806.000 | - | - | 124.136.000 | 786.942.000 |
| 8 | Karangtengah | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 212.211.000 | 1.019.113.000 |
| 9 | Tirtomoyo | 662.806.000 | - | - | 262.334.000 | 925.140.000 |
| 10 | Soka | 662.806.000 | - | - | 351.295.000 | 1.014.101.000 |
| 11 | Kebapangan | 662.806.000 | - | - | 237.535.000 | 900.341.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | | | | | 9.625.372.000 |
| XXVI. | KECAMATAN KARANGSAMBUNG | | | | | |
| 1 | Widoro | 662.806.000 | - | - | 366.449.000 | 1.029.255.000 |
| 2 | Seling | 662.806.000 | - | - | 185.987.000 | 848.793.000 |
| 3 | Pencil | 662.806.000 | - | - | 136.995.000 | 799.801.000 |
| 4 | Kedungwaru | 662.806.000 | - | - | 285.304.000 | 948.110.000 |
| 5 | Kaligending | 662.806.000 | - | - | 510.166.000 | 1.172.972.000 |
| 6 | Plumbon | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 840.343.000 | 1.684.783.000 |
| 7 | Pujotirto | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 554.658.000 | 1.399.098.000 |
| 8 | Wadasmalang | 662.806.000 | - | 144.096.000 | 686.135.000 | 1.493.037.000 |
| 9 | Tlepok | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 268.759.000 | 1.113.199.000 |
| 10 | Kalisana | 662.806.000 | 181.634.000 | - | 433.520.000 | 1.277.960.000 |
| 11 | Langse | 662.806.000 | - | - | 388.295.000 | 1.051.101.000 |
| 12 | Banioro | 662.806.000 | - | - | 235.409.000 | 898.215.000 |
| 13 | Karangsambung | 662.806.000 | - | - | 571.206.000 | 1.234.012.000 |
| 14 | Totogan | 662.806.000 | - | - | 437.011.000 | 1.099.817.000 |
| | Jumlah | | | | | 16.050.153.000 |
| Total | | 297.599.894.000 | 3.269.412.000 | 5.763.840.000 | 103.245.066.000 | 409.878.212.000 |

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

A. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA TAHAP I

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP I

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

| NO | JENIS | BERKAS | | HASIL EVALUASI ADMINISTRASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ADA | TIDAK ADA | LENGKAP | TIDAK LENGKAP |
| 1. | Permohonan pencairan Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa kepada Camat. | | | | |
| 2. | Kepala Desa telah menyampaikan APB Desa TA 2020 kepada Bupati melalui Kepala Dispermades P3A. | | | | |
| 3. | Fotokopi Rekening Kas Desa | | | | |

HASIL VERIFIKASI :

| | |
|---|---|
| Memenuhi syarat administrasi | |
| Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut | |
| Tim Verifikasi Kecamatan | |
| Camat ..... | 1. ..... .....<br>2. ..... .....<br>3. ..... ..... |

B. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA TAHAP II

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP II

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

| NO | JENIS | BERKAS | | HASIL EVALUASI ADMINISTRASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ADA | TIDAK ADA | LENGKAP | TIDAK LENGKAP |
| 1. | Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat. | | | | |
| 2. | Kepala Desa telah menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.. | | | | |
| 3. | Kepala Desa telah menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) | | | | |
| 4. | Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tahun Anggaran sebelumnya. | | | | |

HASIL VERIFIKASI :

| | |
|---|---|
| Memenuhi syarat administrasi | |
| Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut | |
| Tim Verifikasi Kecamatan | |
| Camat ..... | 1. ..... .....<br>2. ..... .....<br>3. ..... ..... |
| ..... | |

C. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA TAHAP III

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP III

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

| NO | JENIS | BERKAS | | HASIL EVALUASI ADMINISTRASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ADA | TIDAK ADA | LENGKAP | TIDAK LENGKAP |
| 1. | Permohonan pencairan Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa kepada Camat. | | | | |
| 2. | Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). | | | | |
| 3. | Kepala Desa telah menyampaikan laporan konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya | | | | |

HASIL VERIFIKASI :

| | |
|---|---|
| Memenuhi syarat administrasi | |
| Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut | |
| Tim Verifikasi Kecamatan | |
| Camat ……<br><br>…… | 1. …… ……<br>2. …… ……<br>3. …… …… |

D. CONTOH SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....Nomor .....Telp.....

Kebumen, ..... 2020

Nomor : 412.1 /
Lampiran : .....
Perihal : Persetujuan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2020

Kepada :
Yth. Bupati Kebumen
Cq. Kepala Dispermades P3A
Kabupaten Kebumen
di-
KEBUMEN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor .... Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.
Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2020 sebagai berikut:
   a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa kepada Camat;
   b. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020;
   c. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan Dana Desa tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 di ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat .....

(.....)

E. CONTOH SURAT PERSETUJUAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....Nomor .....Telp.....

Kebumen, ..... 2020

Nomor : 412.1 /
Lampiran : .....
Perihal : Persetujuan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2020

Kepada :
Yth. Bupati Kebumen
c.q. Kepala Dispermades P3A
Kabupaten Kebumen
di-
KEBUMEN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor .... Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.
Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
   a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat;
   b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
   c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
   d. serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tahun Anggaran sebelumnya.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkait dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 di ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat dicairkan lewat rekening desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat .....

(.....)

F. CONTOH SURAT PERSETUJUAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP III

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....Nomor .....Telp.....

Kebumen, .....2020

Nomor : 412.1 /
Lampiran : .....
Perihal : Persetujuan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2020

Kepada :
Yth. Bupati Kebumen
c.q. Kepala Dispermades P3A
Kabupaten Kebumen
di-
KEBUMEN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor .... Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.
Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
   a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa kepada Camat;
   b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
   c. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkait dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 di ..... (.....) Desa di Kecamatan ..... dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat dicairkan lewat rekening desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat .....

(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR ..... TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT TABEL REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAN, URAIAN *OUTPUT*, VOLUME *OUTPUT*, SATUAN *OUTPUT* DAN CAPAIAN *OUTPUT*
BIDANG PEMBANGUNAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

| BIDANG | RINCIAN BIDANG | KEGIATAN | SIFAT KEGIATAN | CARA PENGADAAN | URAIAN *OUTPUT* | SATUAN *OUTPUT* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pembangunan | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman | rumah sehat untuk fakir miskin | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Rumah Sehat | unit |
| | | selokan | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Selokan | meter |
| | | tempat pembuangan sampah | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Tempat Pembuangan sampah | unit |
| | | gerobak sampah | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Gerobak Sampah | unit |
| | | kendaraan pengangkut sampah | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Kendaraan Pengangkut sampah | unit |
| | | mesin pengolah sampah | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Mesin Pengolah Sampah | unit |
| | | Lain-lain (sebutkan) | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Lain-lain (Sebutkan) | unit |
| | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi | tambatan perahu | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Tambatan perahu | unit |
| | | Jalan Desa | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Jalan Desa | meter |
| | | Jalan Pemukiman | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Jalan Pemukiman | meter |
| | | jembatan Desa | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | jembatan Desa | meter |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | gorong-gorong | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | gorong-gorong | meter |
| | | terminal Desa | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | terminal Desa | unit |
| | | Lain-lain (sebutkan) | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Lain-lain (Sebutkan) | satuan |
| | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi | pembangkit listrik tenaga mikrohidro | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | pembangkit listrik tenaga mikrohidro | watt |
| | | pembangkit listrik tenaga diesel | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | pembangkit listrik tenaga diesel | watt |
| | | pembangkit listrik tenaga matahari | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | pembangkit listrik tenaga matahari | watt |
| | | instalasi bio gas | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | instalasi biogas | unit |
| | | jaringan distribusi tenaga listrik | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | jaringan distribusi tenaga listrik | watt |
| | | Lain-lain (sebutkan) | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Lain-lain (Sebutkan) | satuan |
| | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi | jaringan internet untuk warga Desa | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | jaringan internet untuk warga Desa | unit |
| | | website Desa | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | website Desa | unit |
| | | peralatan pengeras suara (*loudspeaker*) | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | peralatan pengeras suara (*loudspeaker*) | unit |
| | | telepon umum | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | telepon umum | unit |
| | | radio *Single Side Band* (SSB) | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | radio *Single Side Band* (SSB) | unit |
| | | Lain-lain (sebutkan) | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Lain-lain (Sebutkan) | satuan |
| | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan | air bersih berskala Desa | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | air bersih berskala Desa | unit |
| | | sanitasi lingkungan | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | sanitasi lingkungan | unit |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | sarana dan prasarana kesehatan | jambanisasi | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | jamban | unit |
| | | mandi, cuci, kakus (MCK) | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | mandi, cuci, kakus (MCK) | unit |
| | | mobil/kapal motor untuk *ambulance* Desa | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | mobil/kapal motor untuk *ambulance* Desa | unit |
| | | alat bantu penyandang disabilitas | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | alat bantu penyandang disabilitas | unit |
| | | panti rehabilitasi penyandang disabilitas | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | panti rehabilitasi penyandang disabilitas | unit |
| | | poliklinik/balai pengobatan | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | poliklinik/balai pengobatan | unit |
| | | posyandu | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | posyandu | unit |
| | | penambahan ruang rawat inap poskesdes | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | ruang rawat inap poskesdes (posyandu | unit |
| | | pengadaan tambahan peralatan kesehatan | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | peralatan kesehatan *emergency* poskesdes | unit |
| | | Lain-lain (sebutkan) | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Lain-lain (Sebutkan) | satuan |
| | Pengadaan, pembangunan, pengem-bangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan | taman bacaan masyarakat | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | taman bacaan masyarakat | unit |
| | | bangunan Pendidikan Anak Usia Dini | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | bangunan Pendidikan Anak Usia Dini | unit |
| | | buku dan peralatan belajar Pendidikan | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | buku dan peralatan belajar Pendidikan | unit |
| | | wahana permainan permainan anak di | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | wahana permainan permainan anak di | unit |
| | | taman belajar keagamaan | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | taman belajar keagamaan | unit |
| | | bangunan perpustakaan Desa | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | bangunan perpustakaan Desa | unit |
| | | buku/bahan bacaan | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | buku/bahan bacaan | unit |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | balai pelatihan / belajar masyarakat | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | balai pelatihan/kegiatan | unit |
| | | sanggar seni | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | sanggar seni | unit |
| | | film dokumenter | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | film dokumenter | unit |
| | | peralatan kesenian | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | peralatan kesenian | unit |
| | | *amphitheater* di ruang publik pantai | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | *amphitheater* di ruang publik pantai | unit |
| | | fasilitas penunjang acara tradisi sedekah | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | fasilitas penunjang acara tradisi sedekah | unit |
| | | Lain-lain (sebutkan) | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Lain-lain (Sebutkan) | satuan |
| | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan | bendungan berskala kecil | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | bendungan berskala kecil | unit |
| | | pembangunan atau perbaikan embung | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | embung dan /atau sistem pengairan | unit |
| | | irigasi Desa | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | irigasi Desa | meter |
| | | percetakan lahan pertanian | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | lahan pertanian | meter |
| | | kolam ikan | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | kolam ikan | unit |
| | | kapal penangkap ikan | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | kapal penangkap ikan | unit |
| | | tempat pendaratan kapal penangkap ikan | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | tempat pendaratan kapal penangkap ikan | unit |
| | | tambak garam | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | tambak garam | unit |
| | | kandang ternak | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | kandang ternak | unit |
| | | mesin pakan temak | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | mesin pakan ternak | unit |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | gudang penyimpanan sarana produksi | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | gudang penyimpanan sarana produksi | unit |
| | | pusat budidaya, pembenihan dan | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | pusat budidaya, pembenihan dan | unit |
| | | rehabilitasi pasar ikan | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | pasar ikan | unit |
| | | Lain-lain (sebutkan) | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Lain-lain (Sebutkan) | satuan |
| | Pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan | pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra dan tempat penjemuran ikan | unit |
| | | lumbung Desa | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | lumbung Desa | unit |
| | | gudang pendingin (*cold storage*) | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | gudang pendingin (*cold storage*) | unit |
| | | Lain-lain (sebutkan) | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Lain-lain (Sebutkan) | unit |
| | Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan | mesin jahit | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | mesin jahit | unit |
| | | peralatan bengkel kendaraan bermotor | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | peralatan bengkel kendaraan bermotor | unit |
| | | mesin bubut untuk mebeler | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | mesin bubut untuk mebeler | unit |
| | | Lainnya (Sebutkan) | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Lainnya (Sebutkan) | satuan |
| | Pengadaan, pembangunan, | pasar Desa | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | pasar Desa | unit |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan | pasar sayur | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | pasar sayur | unit |
| | | pasar hewan | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | pasar hewan | unit |
| | | tempat pelelangan ikan | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | tempat pelelangan ikan | unit |
| | | toko *online* | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | toko *online* | unit |
| | | gudang barang | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | gudang barang | unit |
| | | Lain-lain (sebutkan) | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Lain-lain (Sebutkan) | satuan |
| | Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata | pondok wisata | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | pondok wisata | unit |
| | | panggung hiburan | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | panggung hiburan | unit |
| | | kios cenderamata | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | kios cenderamata | unit |
| | | kios warung makan | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | kios warung makan | unit |
| | | wahana permainan anak | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | wahana permainan anak | unit |
| | | wahana permainan *outbound* | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | wahana permainan *outbound* | unit |
| | | taman rekreasi | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | taman rekreasi | unit |
| | | tempat penjualan tiket | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | tempat penjualan tiket | unit |
| | | rumah penginapan | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | rumah penginapan | unit |
| | | angkutan wisata | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | angkutan wisata | unit |
| | | pemeliharaan *joggingpath track* | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Pemeliharaan *joggingpath track* | meter |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tembok laut kawasan wisata laut | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | tembok laut kawasan wisata laut | meter |
| | | Lain-lain (sebutkan) | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Lain-lain (Sebutkan) | satuan |
| | Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan | penggilingan padi | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | penggilingan padi | unit |
| | | peraut kelapa | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | peraut kelapa | unit |
| | | penepung biji-bijian | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | penepung biji-bijian | unit |
| | | pencacah pakan ternak | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | pencacah pakan ternak | unit |
| | | sangrai kopi | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | sangrai kopi | unit |
| | | pemotong/ pengiris buah dan sayuran | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | pemotong/ pengiris buah dan sayuran | unit |
| | | pompa air | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | pompa air | unit |
| | | traktor mini | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | traktor mini | unit |
| | | Lain-lain (sebutkan) | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Lain-lain (Sebutkan) | satuan |
| | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup | pembuatan terasering | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | pembuatan terasering | m2 |
| | | kolam untuk mata air | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | kolam untuk mata air | m2 |
| | | plesengan sungai | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | plesengan sungai | m2 |
| | | pencegahan abrasi pantai | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | pencegahan abrasi pantai | m2 |
| | | Pengembangan cemara laut dan pembibitan/ | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Pengembangan cemara laut dan pembibitan/ | pohon |
| | | sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah | unit |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lain-lain (sebutkan) | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Lain-lain (Sebutkan) | satuan |
| | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya | pembangunan jalan evakuasi dalam | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | pembangunan jalan evakuasi dalam | meter |
| | | pembangunan gedung pengungsian | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | pembangunan gedung pengungsian | unit |
| | | pembersihan lingkungan perumahan | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | pembersihan lingkungan perumahan | unit |
| | | rehabilitasi dan rekonstruksi | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | rehabilitasi dan rekonstruksi | unit |
| | | Lain-lain (sebutkan) | Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan | Swakelola/ Kontrak | Lain-lain (Sebutkan) | satuan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa | Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap | Swakelola/ Pihak Ketiga | Jumlah peserta yang terlatih | orang |
| | | Membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut | Swakelola/ Pihak Ketiga | Terbentuknya kelembagaan lokal pengelolaan pantai | unit |
| | | Lain-lain (Sebutkan) | Swakelola/ Pihak Ketiga | Lain-lain (sebutkan) | satuan |

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

# FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kab/Kota.....(1)

Dengan rincian :

| TAHAP | TANGGAL DITERIMA | JUMLAH | TERBILANG (dengan huruf) |
|---|---|---|---|
| (2) | (3) | (4) | (5) |

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : .....(6)

Nama Rekening : .....(7)

Nama Bank : .....(8)

....., tanggal .....(9)

.....(10)

Stempel

Materai
Rp.6.000,-

.....(11)

.....(12)

**PETUNJUK PENGISIAN**
**LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA**
**DI REKENING KAS DESA**

| NOMOR | URAIAN ISIAN |
|---|---|
| (1) | Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa |
| (2) | Diisi tahapan penyaluran |
| (3) | Diisi tanggal dana diterima |
| (4) | Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka) |
| (5) | Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf) |
| (6) | Diisi nomor rekening penerima dana |
| (7) | Diisi nama rekening penerima dana |
| (8) | Diisi nama bank penerima dana |
| (9) | Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat |
| (10) | Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa) |
| (11) | Diisi tanda tangan (kepala Desa) |
| (12) | Diisi nama penanda tangan (kepala Desa) |

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020

A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa
   1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
      a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
         1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
         2) penerangan lingkungan pemukiman;
         3) pedestrian;
         4) drainase;
         5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
         6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
         7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
         8) sumur resapan;
         9) selokan;
         10) tempat pembuangan sampah;
         11) gerobak sampah;
         12) kendaraan pengangkut sampah;
         13) mesin pengolah sampah;
         14) pembangunan ruang terbuka hijau;
         15) pembangunan bank sampah Desa; dan
         16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

      b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
         1) perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan Daerah Aliran Sungai;
         2) tambatan perahu;
         3) dermaga apung;
         4) tambat apung (*buoy*);
         5) jalan pemukiman;
         6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
         7) jalan poros Desa;
         8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
         9) jembatan Desa:
         10) gorong-gorong;
         11) terminal Desa; dan
         12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
   1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
   2) pembangkit listrik tenaga diesel;
   3) pembangkit listrik tenaga matahari;
   4) pembangkit listrik tenaga angin;
   5) instalasi biogas;
   6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
   7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
   1. jaringan internet untuk warga Desa;
   2. *website* Desa;
   3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
   4. radio *Single Side Band* (SSB); dan
   5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
   a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
      1) air bersih berskala Desa;
      2) jambanisasi;
      3) mandi, cuci, kakus (MCK);
      4) mobil/kapal motor untuk *ambulance* Desa;
      5) balai pengobatan;
      6) posyandu;
      7) poskesdes/polindes;
      8) posbindu;
      9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
      10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
      11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

   b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
      1) taman bacaan masyarakat;
      2) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini bagi Desa yang belum ada gedung Pendidikan Anak Usia Dini;
      3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung Pendidikan Anak Usia Dini untuk Pengembangan Anak Usia Dini secara Holistik Integratif;
      4) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
      5) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
      6) taman belajar keagamaan;
      7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
      8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
      9) bangunan perpustakaan Desa;
      10) buku/bahan bacaan;
      11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
      12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
      13) film dokumenter;

14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
15) pembuatan galeri atau museum Desa;
16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
   a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1) bendungan berskala kecil;
      2) pembangunan atau perbaikan embung;
      3) irigasi Desa;
      4) pencetakan lahan pertanian;
      5) kolam ikan;
      6) kapal penangkap ikan;
      7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
      8) tambak garam;
      9) kandang ternak;
      10) mesin pakan ternak;
      11) mesin penetas telur;
      12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
      13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
      14) embung Desa;
      15) gudang pendingin (*cold storage*);
      16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
      17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
      18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
      19) keramba jaring apung;
      20) keranjang ikan;
      21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
      22) alat produksi es;
      23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
      24) tempat penjemuran ikan; dan
      25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

   b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1) mesin jahit;
2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
3) mesin penepung ikan;
4) mesin penepung ketela pohon;
5) mesin bubut untuk mebeler;
6) mesin *packaging* kemasan;
7) roaster kopi;
8) mesin percetakan;
9) bioskop mini;
10) alat pengolahan hasil perikanan;
11) *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1) pasar Desa;
   2) pasar sayur;
   3) pasar hewan;
   4) tempat pelelangan ikan;
   5) toko *online*;
   6) gudang barang;
   7) tempat pemasaran ikan; dan
   8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
   1) ruang ganti dan/atau toilet;
   2) *pergola*;
   3) *gazebo*;
   4) lampu taman;
   5) pagar pembatas;
   6) pondok wisata (*homestay*);
   7) panggung kesenian/pertunjukan;
   8) kios cenderamata;
   9) pusat jajanan kuliner;
   10) tempat ibadah;
   11) menara pandang (*viewing deck);*
   12) gapura identitas;
   13) wahana permainan anak;
   14) wahana permainan outbound;
   15) taman rekreasi;
   16) tempat penjualan tiket;
   17) angkutan wisata;
   18) *tracking* wisata mangrove;
   19) peralatan wisata snorkeling dan *diving;*
   20) papan interpretasi;
   21) sarana dan prasarana kebersihan;
   22) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);

23) *internet corner*; dan
24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) penggilingan padi;
2) peraut kelapa;
3) penepung biji-bijian;
4) pencacah pakan ternak;
5) mesin sangrai kopi;
6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
7) pompa air;
8) traktor mini;
9) desalinasi air laut;
10) pengolahan limbah sampah;
11) kolam budidaya;
12) mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1) pembuatan terasering;
2) kolam untuk mata air;
3) plesengan sungai;
4) pencegahan kebakaran hutan;
5) pencegahan abrasi pantai;
6) pembangunan talud;
7) papan informasi lingkungan hidup;
8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
9) rehabilitasi kawasan mangrove;
10) penanaman bakau; dan
11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
3) pembangunan gedung pengungsian;
4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
7) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan untuk bencana;
8) Alat Pemadam Api Ringan di Desa; dan
9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
   1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
      a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
         1) pelatihan pengelolaan air minum;
         2) pelayanan kesehatan lingkungan;
         3) bantuan insentif untuk kader Pendidikan Anak Usia Dini, kader posyandu dan Kader Pembangunan Manusia;
         4) alat bantu penyandang disabilitas;
         5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
         6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
         7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
         8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
         9) sosialisasi gerakan aman pangan;
         10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kemban, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan lain-lain;
         11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
         12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
         13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
         14) penguatan Pos Penyuluhan Desa;
         15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
         16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dan lain-lain;
         17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
         18) kampanye dan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
         19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
         20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
         21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
         22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera berbasis era Digitalisasi;
         23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
         24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
         25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi Air Susu Ibu, pembuatan makanan pendamping Air

Susu Ibu, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1) bantuan insentif guru/pembina Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Taman Pendidikan Alquran/Taman Kanak-kanak Alquran/Taman Pendidikan Quran/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
2) penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini secara Holistik Integratif;
3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
4) pembiayaan pelatihan guru Pendidikan Anak Usia Dini tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
5) pelatihan untuk Kader Pembangunan Manusia;
6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
8) pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya;
9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
11) pelatihan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang pencegahan perkawinan anak;
12) pelatihan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah bagi warga miskin;
14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;

18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku reatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
   a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
      1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
      2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
      3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

   b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
      1) pengelolaan terminal Desa;
      2) pengelolaan tambatan perahu; dan
      3) pengelolaantransportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

   c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
      1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
      2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
      3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
      4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
      5) pengelolaan energi tenaga matahari;
      6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
      7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

   d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
      1) sistem informasi Desa;
      2) *website* Desa;
      3) radio komunitas;
      4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan

5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
   a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1) perbenihan tanaman pangan;
      2) pembibitan tanaman keras;
      3) pengadaan pupuk;
      4) pembenihan ikan air tawar;
      5) pengelolaan usaha hutan Desa;
      6) pengelolaan usaha hutan sosial;
      7) pengadaan bibit/induk ternak;
      8) inseminasi buatan;
      9) pengadaan pakan ternak;
      10) tepung tapioka;
      11) kerupuk;
      12) keripik jamur;
      13) keripik jagung;
      14) ikan asin;
      15) abon sapi
      16) susu sapi;
      17) kopi;
      18) coklat;
      19) karet;
      20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dam ikan abon);
      21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dan lain lain);
      22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dan lain lain);
      23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
      24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
      25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
      26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

   b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1) meubelair kayu dan rotan,
      2) alat-alat rumah tangga;
      3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
      4) kain tenun;
      5) kain batik;
      6) bengkel kendaraan bermotor;
      7) pedagang di pasar;
      8) pedagang pengepul;
      9) pelatihan pengelolaan docking kapal;

10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
   1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
   2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
   3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
   4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1) pengelolaan hutan Desa;
   2) pengelolaan hutan adat;
   3) pengelolaan air minum;
   4) pengelolaan pariwisata Desa;
   5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
   6) pengelolaan wisata hutan mangrove (*tracking*, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
   7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
   8) pelatihan pembenihan ikan;
   9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
   10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1) hutan kemasyarakatan;
   2) hutan tanaman rakyat;
   3) kemitraan kehutanan;
   4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
   5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
   6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
   7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1) sosialisasi Teknologi Tepat Guna;
   2) pos pelayanan teknologi Desa;

3) percontohan Teknologi Tepat Guna untuk:
   a. produksi pertanian;
   b. pengembangan sumber energi perdesaan;
   c. pengembangan sarana transportasi;
   d. pengembangan sarana komunikasi; dan
   e. pengembangan jasa dan industri kecil;
4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
6) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1) penyediaan informasi harga/pasar;
   2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
   3) kerjasama perdagangan antar Desa;
   4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
   5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
   2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
   3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
   4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
   5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1) pembibitan pohon langka;
   2) reboisasi;
   3) rehabilitasi lahan gambut;
   4) pembersihan daerah aliran sungai;
   5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
   6) pemeliharaan hutan bakau;
   7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
   8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
   9) pelatihan pengolahan limbah; dan
   10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
   a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
      1) pengembangan Sistem Informasi Desa;
      2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;

3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
1) penyusunan arah pengembangan Desa;
2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
1) pendataan potensi dan aset Desa;
2) penyusunan profil Desa/data Desa;
3) penyusunan peta aset Desa;
4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
5) dukungan penetapan IDM;
6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
4) rembug *stunting* di Desa;
5) rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
   1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
   2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
   3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
   4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
   1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
   2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
   3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
   1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
   2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
   3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
   4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
   5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
   2) pelatihan industri rumahan;
   3) pelatihan teknologi tepat guna;
   4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
   5) Pelatihan pemandu Wisata;
   6) Interpretasi wisata;
   7) Pelatihan Bahasa Asing;
   8) Pelatihan Digitalisasi;
   9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;

10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
14) Pelatihan teknik pemasaran online;
15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1) pemantauan berbasis komunitas;
2) audit berbasis komunitas;
3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa
1. Bidang Pembangunan Desa:
a) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

b) Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.

c) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
1) penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;

2) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
3) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
4) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

d) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

D. Alokasi Afirmasi

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa

Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Kegiatan penanggulangan kemiskian yang bersumber dari alokasi afirmasi antara lain:

1) pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
2) pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
3) membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
4) membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
5) mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
6) mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
7) memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
8) mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
9) kegiatan penanggulangan kemiskian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Contoh format 1. Laporan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI/WALI KOTA PENETAPAN PRIORIT

| NO | PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA, KECAMATAN, DESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | JAWA BARAT | | | |
| | | 3201 | BOGOR | | |
| | | | 320102 | GUNUNG PUTRI | |
| | | | | 3,2E+09 | WANAHERANG |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 3,2E+09 | BOJONG KULUR |
| | | | | 3,2E+09 | CIANGSANA |
| | | | | 3,2E+09 | GUNUNG PUTRI |
| | | | | 3,2E+09 | BOJONG NANGKA |
| | | | | 3,2E+09 | TLAJUNG UDIK |
| | | | | 3,2E+09 | CICADAS |
| | | | | 3,2E+09 | CIKEAS UDIK |
| | | | | 3,2E+09 | NAGRAK |
| | | | | 3,2E+09 | KARANGGAN |
| | | | | | |

Contoh format 2. Laporan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur LAPORAN

| NO | PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA, KECAMATAN, DESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | JAWA BARAT | | | |
| | | 3201 | BOGOR | | |
| | | | 320102 | GUNUNG PUTRI | |
| | | | | 3,2E+09 | WANAHERANG |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3,2E+09 | BOJONG KULUR |
| | | | | 3,2E+09 | CIANGSANA |
| | | | | 3,2E+09 | GUNUNG PUTRI |
| | | | | 3,2E+09 | BOJONG NANGKA |
| | | | | 3,2E+09 | TLAJUNG UDIK |
| | | | | 3,2E+09 | CICADAS |
| | | | | 3,2E+09 | CIKEAS UDIK |
| | | | | 3,2E+09 | NAGRAK |
| | | | | 3,2E+09 | KARANGGAN |
| | | | 320102 | GUNUNG PUTRI | |
| | | | | 3,2E+09 | PUSPASARI |
| | | | | 3,2E+09 | CITEUREUP |
| | | | | 3,2E+09 | LEUWINUTUG |
| | | | | 3,2E+09 | TAJUR |
| | | | | 3,2E+09 | SANJA |
| | | | | 3,2E+09 | KARANG ASEM TIMUR |
| | | | | 3,2E+09 | TARIKOLOT |
| | | | | 3,2E+09 | GUNUNGSARI |
| | | | | 3,2E+09 | TANGKIL |
| | | | | 3,2E+09 | SUKAHATI |
| | | | | 3,2E+09 | HAMBALANG |
| | | | | 3,2E+09 | PASIRMUKTI |
| | | | | | |
| | | 3202 | SUKABUMI | | |
| | | | 320201 | PALABUHANRATU | |
| | | | | 3,2E+09 | TONJONG |
| | | | | | |
| | | | 320202 | SIMPENAN | |
| | | | | 3,2E+09 | CIDADAP |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

‘AS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

| |
|---|
| |
| **E** |
| **SARANA PRASARANA DASAR** |
| NO |
| |
| |
| |
| |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

BUPATI/WALI KOTA KEPADA GUBERNUR PENETAPAN PRIORITASPENGGUNAAN

| **SARANA PRASARANA DASAR** |
|---|
| NO |
| |
| |
| |
| |

| KEGIATAN PRIORITAS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SARANA PRASARANA PELA | | | | | SARANA PRASARANA EKO | | | | |
| HASI | VO | SA | AN | NO | HASI | VO | SA | AN | NO | HASI | VO | SA | AN |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

N DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 Contoh Format 3. Laporan

| | | | | SARANA PRASARANA PELA | | | | | SARANA PRASARANA EKO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN SE | VO | SA | AN | NO | AN SE | VO | SA | AN | NO | HASI | VO | SA | AN |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| SARANA PRASARANA LING | | | | | SARANA PRASARANA LAIN | | | | | BIDANG PEMBERDAYA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HASI | VC | SA | AN | NO | HASI | VC | SA | AN | NO | HASI | VC |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Gubernur kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras

| SARANA PRASARANA LING | | | | | SARANA PRASARANA LAIN | | | | | BIDANG PEMBERDAYA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HASI | VC | SA | AN | NO | HASI | VC | SA | AN | NO | AN SE | VC |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | KEGIATAN BELUM PRIORITAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AN M** | | **BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA** | | | | | **BIDANG PEMB** |
| SA | AN | NO | HASI | VO | SA | AN | NO |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

si LAPORAN GUBERNUR KEPADA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TE

| **AN M** | | **BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA** | | | | | **BIDANG PEMB** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | AN | NO | HASI | VO | SA | AN | NO |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| S | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BINAAN KEMA** | | | | **ENCANA, KEADAAN DARURA** | | | | |
| HASI | VC | SA | AN | NO | HASI | VC | SA | AN |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI PENETAP

| **BINAAN KEMA** | | | | **ENCANA, KEADAAN DARURA** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HASI | VC | SA | AN | NO | HASI | VC | SA | AN |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI TENTANG PENETAPAN

| NO | KODE & NAMA KECAMATAN/KODE & NAMA DESA | | KEGIATAN PRIORITAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SARANA PRASARANA DASAR | | | | | SARANA PRASARANA PELAYANAN SOSIAL DASAR | | | | | SARANA PRASARANA EKONOMI | | | | | SARANA PRASARANA LINGKUNGAN | | | | | |
| | | | NO | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOL. | SAT. | ANGGARAN | NO | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOL. | SAT. | ANGGARAN | NO | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOL. | SAT. | ANGGARAN | NO | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOL. | SAT. | ANGGARAN | NO |
| 1 | | KECAMATAN ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DESA ..... | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | DST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | |

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR .... TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

| | | | | | | | | | KEGIATAN BELUM PRIORITAS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARANA PRASARANA LAINYA | | | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | | | | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | | | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURATDAN KEMENDESAKAN DESA | | | | |
| HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOL. | SAT. | ANGGARAN | NO | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOL. | SAT. | ANGGARAN | NO | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOL. | SAT. | ANGGARAN | NO | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOL. | SAT. | ANGGARAN | NO | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOL. | SAT. | ANGGARAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - |

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

A. KEGIATAN PRIORITAS

| NO | KODE & NAMA KECAMATAN/KODE & NAMA DESA | | KEGIATAN PRIORITAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SARANA PRASARANA DASAR | | | | | SARANA PRASARANA PELAYANAN SOSIAL DASAR | | | | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA<br>SARANA PRASARANA EKONOMI | | | | | SARANA PRASARANA LINGKUNGAN | | | | | SARANA PRASARANA LAINYA | | | | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | |
| | | | NO | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOL. | SAT. | ANGGARAN | NO | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOL. | SAT. | ANGGARAN | NO | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOL. | SAT. | ANGGARAN | NO | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOL. | SAT. | ANGGARAN | NO | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOL. | SAT. | ANGGARAN | NO | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOL. | SAT. | ANGGARAN |
| 1 | | KECAMATAN ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DESA ..... | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | DST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - |

B. KEGIATAN BELUM PRIORITAS

| NO | KODE & NAMA KECAMATAN/KODE & NAMA DESA | | KEGIATAN BELUM PRIORITAS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | | | | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | | | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURATDAN KEMENDESAKAN DESA | | | | |
| | | | NO | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOL. | SAT. | ANGGARAN | NO | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOL. | SAT. | ANGGARAN | NO | HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS | VOL. | SAT. | ANGGARAN |
| 1 | | KECAMATAN ..... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DESA ..... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - |

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN……..
DESA……
Jalan……Nomor ……Telp……..

==========

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor : 900/

Nama Desa : ……
Surat Pertanggungjawaban : Dana Desa Tahun Anggaran 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ……. Kecamatan …… Kabupaten Kebumen, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

| Uraian | Jumlah Kegiatan | Jumlah Dana |
|---|---|---|
| Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahun Anggaran 2019 | ……. Kegiatan | Rp. ……. |

Bukti-bukti belanja yang menjadi lampiran Surat Pertangungjawaban (SPJ) disimpan sesuai ketentuan yang berlaku Asli, disimpan di Desa ……. Kecamatan …… Kabupaten Kebumen untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.
Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya.

……, ……. 2020

Kepala Desa ……
Selaku PKPKD

**……**

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 - 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JUMLAH BELANJA | | | | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Pengeluaran Pembiayaan | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Penyertaan Modal Desa | | | | - | - | - | | | | | |
| | - Modal Awal | | | | - | - | - | | | | | |
| | - Pengembangan Usaha | | | | - | - | - | | | | | |
| | - dst..... | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN | | | | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH<br>(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN | | | | - | - | -<br>Rp. | | | | | |

Disetujui oleh,
....., ..... 2020

KAUR KEUANGAN/BENDAHARA DESA

(.....)

KEPALA DESA .....

(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

# FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

## LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

**KABUPATEN** : **KECAMATAN** :
**DESA** : **TAHUN** :

**TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)**

| SASARAN | JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK | IBU HAMIL | | ANAK 0 – 23 BULAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL | KEK/RESTI | TOTAL | GIZI KURANG/ GIZI BURUK/*STUNTING* |
| JUMLAH | | | | | |

**TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)**

| SASARAN | JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN | HIJAU (NORMAL) | KUNING (RESIKO *STUNTING*) | MERAH (TERINDIKASI *STUNTING*) |
|---|---|---|---|---|
| JUMLAH | | | | |

**TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI 1.000 HPK**

| SASARAN | | INDIAKTOR | JUMLAH | | % |
|---|---|---|---|---|---|
| IBU HAMIL | 1 | PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN | | | |
| | 2 | MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI | | | |
| | 3 | IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI | | | |
| | 4 | MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI | | | |
| | 5 | IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN | | | |
| | 6 | RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN | | | |
| | 7 | RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK | | | |
| | 8 | MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN | | | |
| ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN) | 1 | ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP | | | |
| | 2 | DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN | | | |
| | 3 | DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN | | | |
| | 4 | ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN | LAKI-LAKI | TOTAL | |
| | 5 | KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING | | | |
| | 6 | RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN | | | |
| | 7 | RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK | | | |
| | 8 | ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN | | | |
| | 9 | ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR | | | |
| | 10 | ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD) | | | |
| ANAK >2-6 TAHUN | 1 | ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80% | | | |

**TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA**

| NO | SASARAN | JUMLAH INDIKATOR | | TINGKAT KONVERGENSI |
|---|---|---|---|---|
| | | YANG DITERIMA | SEHARUSNYA DITERIMA | |
| 1 | IBU HAMIL | | | |
| 2 | ANAK 0-23 BULAN | | | |
| TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA | | | | |

**TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING***

| NO | BIDANG/KEGIATAN | TOTAL ALOKASI DANA | KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN *STUNTING* | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ALOKASI DANA | % (PERSEN) |
| 1 | BIDANG PEMBANGUNAN DESA | | | |
| 2 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | |

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

A. FORMAT LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2020 OLEH KEPALA DESA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA .....
TAHUN ANGGARAN 2020

Sumber dana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisasi s.d ..... 2020

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | PENDAPATAN | | | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | - | - | - |
| 4.2.1. | Dana Desa | - | - | - |
| | JUMLAH PENDAPATAN | - | - | - |
| 5. | BELANJA | | | |
| 5.1. | Bidang ..... | - | - | - |
| 5.1.1. | Kegiatan ..... | - | - | - |
| 5.1.1.1. | Belanja Pegawai | - | - | - |
| 5.1.1.1.1 | ..... | - | - | - |
| 5.1.1.1.2. | dst | - | - | - |
| 5.1.1.2. | Belanja Barang dan Jasa | - | - | - |
| 5.1.1.2.1. | ..... | - | - | - |
| 5.1.1.2.2. | dst | - | - | - |
| 5.1.1.3. | Belanja Modal | - | - | - |
| 5.1.1.3.1. | ..... | - | - | - |
| 5.1.1.3.2. | dst | - | - | - |
| 5.1.2. | Kegiatan .....(dst) | - | - | - |
| 5.2. | Bidang .....(dst) | - | - | - |
| | JUMLAH BELANJA | - | - | - |
| | | | | |
| | SURPLUS / (DEFISIST) | - | - | - |
| 6. | PEMBIAYAAN | | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | - | - | - |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | - | - | - |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | - | - | - |
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - |
| | PEMBIAYAAN NETTO | - | - | - |
| | | | | |
| | SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN | - | - | - |

....., ..... 2020
Kepala Desa .....

.....

B. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2020 OLEH CAMAT

REKAPITULASI LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN :.....

KEADAAN BULAN :.....

| NO. | URAIAN PENERIMAAN | TOTAL DD TERSEDIA DI DESA TAHUN 2020 | URAIAN KEGIATAN | REALISASI PENGGUNAAN DD TH 2020 DAN SISA DD TH 2019 | | | | | | | SISA DD DI RKD S/D BULAN INI | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BIDANG PENYELENG-GARAAN PEMERIN-TAHAN | BIDANG PELAKSA-NAAN PEMBA-NGUNAN | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARA-KATAN | BIDANG PEMBER-DAYAAN MASYARAKAT | BIDANG TAK TERDUGA | PEMBIAYAAN (PENYER-TAAN MODAL BUMDESA/ PEMBEN-TUKAN DANA CADANGAN) | TOTAL PENGGU-NAAN DD S/D BULAN INI | | |
| | | (Rp) | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(5+6+7+8+9+10) | 12=(3-11) | 13 |
| 1 | Desa ..... | | | | | | | | | | | |
| | 1 SILPa DD Th 2019 di Rekening Kas Desa (bila ada) | ..... | 1 Kegiatan..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | | |
| | 2 Realisasi Penyaluran DD Th 2020 | ..... | 2 Kegiatan..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | | |
| | | | 3 Dst. | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | | |
| | JUMLAH | ..... | JUMLAH | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
| 2 | Desa ..... | | | | | | | | | | | |
| | 1 SILPa DD Th 2019 di Rekening Kas Desa (bila ada) | ..... | 1 Kegiatan..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | | |
| | 2 Realisasi Penyaluran DD Th 2020 | ..... | 2 Kegiatan..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | | |
| | | | 3 Dst. | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | | |
| | JUMLAH | ..... | JUMLAH | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
| 3 | Desa .....(dst) | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH | ..... | JUMLAH | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
| | JUMLAH TOTAL KECAMATAN | ..... | JUMLAH TOTAL KECAMATAN | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |

.....,.....2020

CAMAT .....

**.....**

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ